



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI DENGAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BAPPENAS**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 17 (tujuh belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Februari 2020
W a k t u	: 10.00 s.d. 13.23 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Acara	: Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Musyawarah Perencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Hadir	: MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H.M. AMIR USKARA, M.Kes. /WAKATUA KOM. XI/F-PPP):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI yang saya hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat, Rapat Kerja Komisi XI hari ini telah dihadiri dan telah menandatangani daftar hadir, 20 arang anggota yang terdiri dari 8 Fraksi. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi.

Untuk itu, kami mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, ijinakan kami membuka Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL ... WIB)

Sebelum kita mulai rapat kerja pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan Anggota Komisi XI yang baru dari Fraksi Partai Gerindra, Pak Menteri, yaitu Saudara H. Kamrussamad.

Pak Menteri dan Pimpinan serta Anggota Dewan yang kami hormati,

Mengawali Rapat Kerja pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat kerja kita pada hari ini dalam keadaan sehat *wal 'afiat*. Semoga hal-hal yang kita bicarakan dan kita simpulkan pada hari ini *Insyallah* akan bermanfaat untuk Bangsa dan Negara.

Agenda rapat kerja kita hari ini yaitu pertama, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Pak Menteri serta Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunannya struktur perekonomian yang kokoh dengan berlandaskan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tahapan penting yang menjadi bagian dalam proses penyusunan rencana pembangunan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbangnas merupakan rangkaian penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah. Oleh sebab itu, persiapan dan pelaksanaan Musrenbangnas 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergi antara RKP 2021 dengan RKPD yang akan mendorong sasaran pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah menetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim diperkirakan dapat memberikan dampak langsung yang dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Dampak langsung tentu berupa tambahan aktifitas ekonomi melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan operasional penyelenggaraan pemerintah di lokasi baru akan menggerakkan perekonomian. Dampak tidak langsung yang kita harapkan adalah yang terjadi ada-adanya efek pengganda terhadap perekonomian, sehingga menimbulkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penambahan pendapatan masyarakat, sehingga total dampak pemindahan akan memberikan kontribusi pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan rapat kerja hari ini, Komisi XI ingin mengetahui tindaklanjut dari RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Pemindahan Ibu Kota Negara secara komprehensif dari Pak Menteri.

Untuk menghemat waktu, selanjutnya kita persilakan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyampaikan paparan.

Saya persilakan dengan hormat Pak.

F-P. NASDEM (SATORI, S.PdI., MM.):

Interupsi Pimpinan
Satori Pimpinan

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Satori.

F-P. NASDEM (SATORI, S.PdI., MM.):

Ini ada Anggota Komisi XI kita diperkenalkan dulu Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pasti Pak Satori terlambat masuk di ruangan ya?
Silakan Pak Menteri.

F-PD (Ir. ERIKO SUTARDUGA B.P.S):

Tapi belum pernah kita Pak Menteri melihat Pak Amir Uskara sesemangat ini Pak, betul dan menyampaikannya cepat sekali.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Baik.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom,

Selamat Pagi salam sejahtera untuk kita semua,

Om swasti wastu, Namo Budhaya,

Salam kebajikan, rahayu.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat Komisi XI.

Pertama, meskipun sudah Bulan Februari ini, dari meja kami, kami ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru dan yang merayakan Natal, kami ucapkan Selamat Natal, Tuhan Memberkati. Dan mudah-mudahan pada tahun ini kita semua mendapatkan kebahagiaan yang melebihi dari tahun-tahun sebelumnya dan kerja sama kita semakin baik.

Pagi ini kami akan menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024, sesuai permintaan Musrenbangnas, RKP 2020-2021, kemudian persiapan pemindahan Ibu Kota.

Sebagai informasi awal, kami telah memberikan bahan ini 69 lembar. Mudah-mudahan telah diperoleh, kami kirimnya pada hari Kamis minggu lalu. Kemudian kami mendapatkan pertanyaan susulan setelah itu dan baru kami kirim kemarin, kalau saya tidak *khilaf* sebanyak 53 pertanyaan dan secara tertulis sudah kami jawab semuanya dan mudah-mudahan semuanya setelah sampai kepada di meja para Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 ini, untuk sekedar mengingatkan kita semua, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Proses Penyusunan RPJMN 2024, pertama tentu dimulai dengan Naskah Akademik, kemudian Naskah Teknokratik, kemudian dilakukan integrasi visi-misi dan program yang ditawarkan Presiden terpilih dalam hal ini adalah proses politik. Kemudian dilakukan konsultasi publik dalam hal ini adalah Musrenbangnas pada Bulan Juli hingga Desember 2019. Kemudian kemarin tanggal 20 Januari telah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai RPJMN sebagai dokumen perencanaan formal, rujukan pekerjaan pembangunan, segenap pelaku pembangunan. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, penetapan itu harus 3 bulan setelah Presiden dilantik. Jadi 20 Oktober ke 20 Januari, jadi pas.

Dasar-dasar kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, pertama adalah ini kami kutip dari Undang-Undang Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dimana RPJMN 4 itu ditugasi dimandati dengan tema, Percepatan Pembangunan dengan menekannya terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Jadi ini bunyinya adalah Undang-Undang.

Saya lanjutkan.

Kemudian isinya adalah sebagai diikuti dengan arahan Presiden pada pelantikan Beliau, yang intinya adalah 5, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Indonesia menuju negara maju. Ini yang kita ingin cita-citakan dan sekarang menjadi topik di berbagai para pengamat ekonomi termasuk Anggota DPR, termasuk pengusaha, termasuk para profesional, termasuk wartawan-wartawan internasional dan lembaga-lembaga internasional yang mempertanyakan ini. Nanti akan saja jawab secara ringkas terkait ini.

Kita berharap pada tahun 2045, PDB per kapita kita mencapai 23.199 dan pada tahun ini mudah-mudahan kita telah mencapai 4.546. Dan pada tahun 2020 ini kita naik kelas dari *lower middle income* menjadi *upper middle income*. Jadi *upper middle income* itu sebenarnya dari 4.100 dan kita mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sampai tahun 2035, kita bisa keluar dari jebakan *middle income trap* ini dan diharapkan setelah itu kita akan masuk ke *high economy*.

Sebagai gambaran kita dulu mendahului Cina melepaskan diri dari ekonomi rendah di *low economy*, kita duluan masuk di *middle income*, tapi sekarang Cina sudah masuk di *upper middle income* dan mendekati *high economy*. Sekarang sudah sampai di angka 11 ribu.

Untuk itu, maka yang harus dilakukan keluar dari *middle income trap* itu, mendorong industri pengolahan sebagai gambaran meningkatkan kontribusi pengolahan dari 19,9% menjadi 21%, meningkatkan kontribusi industri pengolahan non migas, menjadi 18,9 dan kontribusi kerja, tenaga kerja di sektor industri dari 14,9 ke 15,7. Seperti kita ketahui jika kontribusi dari industri manufaktur itu di bawah 20%, maka sebuah bangsa atau sebuah negara itu dinilai belum masuk ke negara industri. 20%-40% kontribusi industri manufaktur terhadap GDB itu masuk kategori industri sedang. Jadi kita mau masuk, masuk di industri pengolahan.

Yang kedua, mendorong Sektor Pariwisata, setidaknya kita berharap pada tahun 2024 bisa mencapai 32 miliar dolar, dimana pada tahun lalu 19,3 miliar dolar. Mendorong ekonomi kreatif, dimana pada tahun 2018, nilai tambah ekonominya 1.105 triliun, kita berharap 2024 mendekati 2 ribu atau 1.846. Kemudian nilai transaksi *ecommerce* dalam triliun rupiah itu naik hampir empat kali lipat dari 170 menjadi 600 triliun rupiah. Untuk itu dengan *enabler* ini, kita berharap rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 ke 2045 itu 5,7 PDB riilnya, PDB riil per kapitanya 5%. Tahun 2045 kita menjadi negara maju dan PDB terbesar kelima di dunia, diperkirakan 7,4 triliun dolar. Kemudian peranan dari kawasan timur Indonesia sumbangannya terhadap GDP 25%. Untuk itu tentu harus dilakukan transformasi ekonomi yang dimulai pada Tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia maju.

Selanjutnya adalah ini cara kami menyusun RPJMN, dimana ada visi-misi Presiden, sebelumnya juga ada janji-janji Presiden, lalu itu dilakukan proses internalisasi bersamaan dengan arahan Presiden yang menghasilkan 7 agenda pembangunan. Jadi di dalam Perpres itu yang muncul itu adalah 7 agenda pembangunan. Jadi 7 agenda pembangunan yang akan muncul, yang beberapa waktu lalu yang selamanya dipakai sebagai rujukan itu 5 arahan

Presiden. Kami ingin mengingatkan, bahwa yang dipakai dalam pembangunan ke depan ini adalah 7 agenda pembangunan.

Bagaimana kerangka pikir itu? Kerangka pikir itu adalah sebagai berikut, Pertama adalah basisnya itu adalah disk dengan wilayah sebagai basis pembangunan. Kemudian tentu kita berharap ada transformasi ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 6% pada Tahun 2020 ke 2024. Ini didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup dan kerentanan bencana menjadi pertimbangan dan sebagai prasyarat adalah kondisi Polhukhankam yang kondusif antara lain penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, stabilitas politik dan pertahanan keamanan.

Capaian sasaran pembangunan yang diharapkan pada Tahun 2020-2024 ini adalah pertama, pertumbuhan ekonomi dua ribu eh 2019, 2020, oh maaf, maaf sudah betul-betul itu (mengarahkan tayangan *slide*) ya. Sebagai contoh agenda pembangunan. Tadi kan ada 7 agenda pembangunan. Boleh dibalik diulangi kembali ke sebelumnya. Nah ini ada 7 pembangunan. Saya akan contohkan agenda pembangunan pertama. Agenda pembangunan pertama, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, maka faktor-faktornya adalah pertama, penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, peningkatan ekspor penilaian tambah tinggi, penguatan tingkat kandungan dalam negeri TKDN, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Kemudian peningkatan kuantitas ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan pola kemaritiman dan kelautan. Kemudian penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Kemudian kebutuhan pemenuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan. Ini kira-kira struktur atau *playgroundnya*. Jadi *playgroundnya* agenda pembangunan pertama itu di sini.

Agenda pembangunan kedua, *playgroundnya* adalah mengenai mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, maka dengan peningkatan pulau-pulau kepulauan, ada pulau Papua, Kepulauan Maluku, pulau Sulawesi, pulau Sumatera, pulau Jawa-Bali, pembangunan wilayah Nusa Tenggara, wilayah Kepulauan Kalimantan. Yang diisi dengan kegiatan prioritas, pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, kawasan perkotaan, pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmisi kelembagaan dan keuangan daerah.

Kemudian agenda pembangunan ketiga, sebagai contoh, jadi *playgroundnya* adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan prioritas dan daya saing, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Untuk agenda pembangunan keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, ini nanti ada kaitannya dengan kemarin saya diingatkan dan itu ternyata oleh Saudara yang terhormat Saudara Dolfie, tapi setelah saya lihat ternyata bukan yang dimaksud.

Kemudian yang kedua adalah meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Agenda pembangunan kelima, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, isinya adalah infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur untuk pendukung perkotaan, transformasi digital, energi dan ketenagalistrikan.

Kemudian agenda pembangunan keenam. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Isinya adalah pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

Agenda pembangunan ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, terdiri dari konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, penegakkan hukum, menjaga stabilitas keamanan nasional, refomasi-birokrasi dan tata kelola.

Baik, saya sekarang.. Capaian sasaran makro pembangunan. Pertama, pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan investasi, ini 2015 ke 2019 sebagai rujukan. Tingkat inflasi yang rata-rata 3,2%, kemudian tingkat kemiskinan yang 9,41. Kemudian tingkat pengangguran terbuka 5,28, *gini ratio* dicapai 0,382, IPM 71,39. Ini yang kita capai selama 2015 ke 2019. Nah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020-2024, ada dua angka, secara moderat rata-rata 5,7%, optimis 6% dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya di atas 5,7. Nanti kita diskusikan kembali ini. Dan berdasarkan capaian sasaran yang Tahun 2015-2019, maka ditargetkan 2020-2024, tingkat kemiskinan itu antara 6-7%, jadi turun dari 9,41, mudah-mudahan sampai di 6%. Pertumbuhan yang dari 5,0% mudah-mudahan bisa menjadi 5,7-6,0%. Besok Biro Statistik akan mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi dalam Triwulan ke IV dari angka yang kami dengar itu 5,05. Kemudian *ratio gini* akan kita turunkan sampai 0,36 dari 0,382. Emisi gas rumah kaca sesuai dengan *Paris Accord* atau *Paris Agreement*, kita akan mencapai naik di 27,3, kita sebenarnya targetnya 29% di tahun 2030. Kemudian IPM kita mudah-mudahan naik ke 75,54, tingkat pengangguran terbuka bisa kita tekan menjadi 4,3 bahkan ke 3,6.

Arah pembangunan wilayah RPJMN. Tadi telah disampaikan sebagai agenda pembangunan kedua, penekanannya dan kemudian sekarang kira-kira seperti apa konfigurasinya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan 6,7, Sulawesi 7,6 kemudian Maluku 7,3, kemudian Papua 6,6, Nusa Tenggara 6,0, Jawa-Bali 5,9, Sumatera 6,0%. Kebutuhan investasi itu untuk Kalimantan 143,1 triliun, Sulawesi 110 triliun, kemudian untuk Maluku 18,8 triliun, untuk Papua 41,1 triliun, kemudian Nusa Tenggara 19,9 triliun, kemudian untuk Jawa-Bali 742,4 triliun, Sumatera 251,1 triliun. Caranya adalah jadi untuk mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sekian persen tadi itu diperlukan kebutuhan investasi 251,1 misalnya untuk Sumatera. Dan diharapkan kalau itu terjadi, maka tingkat kemiskinan bisa turun ke 7,1 di Sumatera dan pengangguran terbuka 3,6%.

Selanjutnya adalah Musrenbangnas. Ini satu pengulangan saja dan saya kira pasti di teman-teman yang terhormat Komisi XI sudah memahami ini pada tahun 2014 atau 2015, proses ini berkaitan dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Lembaga. Dimulai dari RPJP Nasional, jangka panjang, kemudian visi-misi Presiden dijabarkan ke dalam RPJMN Nasional, kemudian menjadi pedoman untuk renstra Kementerian dan Lembaga, dijabarkan lagi menjadi

RKP, kemudian diacu menjadi Rencana Kerja KL, kemudian menjadi pedoman RAPBN dan menjadi pedoman RKAKL. Selanjutnya tentu akan ada laporan kinerja pembangunan, kinerja anggaran dan kinerja organisasi.

Tahap kegiatan penyusunan RKP, pada bulan Januari itu RKP 2021, konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, tema sasaran dan prioritas pembangunan. Ini semua telah diselesaikan. Kemudian rapat koordinasi teknis, draft rancangan awal RKP. Mudah-mudahan dipertengahan Februari sudah lesai, Maret kita akan mendapatkan pagu indikatif dan rancangan awal RKP, kemudian dilakukan Rakorbangpus dan Musrenbang Provinsi. Musrenbang Nasional, terus Trilateral Meeting pada bulan April, bulan Mei Rancangan RPK, Pembicaraan Pendahuluan DPR dan Juni menjadi surat Menteri PPN kepada Gubernur tentang indikasi proyek prioritas, kemudian diterbitkan Perpres RKP dengan pagu anggaran pada bulan Juni.

Rangkaian Musrenbang sendiri akan dilakukan pertama, rapat koordinasi teknis dengan agenda menyampaikan program, nasional, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas ke daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dengan permasalahan dan potensi di daerah, stakeholder terkait adalah KL dan Pemda. Kemudian rapat koordinasi pembangunan pusat, agendanya adalah menyampaikan draf peraturan Menteri Kepala Bappenas tentang Rancangan RKP 2021. Kemudian penyampaian surat bersama Menteri Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, terkait pagu indikatif, sinkronisasi kebijakan PN PPKP RKP. Jadi mulai dari agenda pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas dan RKP dan pagu anggaran KL, stakeholdernya adalah KL dan Bappeda Provinsi.

Kemudian yang ketiga, Musrenbang Provinsi. Agendanya adalah penyampaian prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas kepada Pemda. Kemudian dukungan pembiayaan Pemda dalam pelaksanaan prioritas nasional, kemudian stakeholder terkait adalah DPR sesuai daerah pemilihan. Jadi saya mau ulangi lagi. Stakeholder DPR sesuai dengan daerah pemilihan, Kementerian Bappenas, kemudian Kemendagri, KL terkait, Pemda-Provinsi dan Pemda Kabupaten/kota serta stakeholder yang terkait di daerah.

Peran DPR adalah menyampaikan aspirasi, mengadilkan alokasi anggaran. Kami sulit kemarin untuk mendapatkan terminologi ini, tapi katanya paling tepat itu adalah mengadilkan alokasi anggaran. Itu rupanya dari, kalau dari Gerindra sudah mantuk-mantuk itu artinya bisa dapat disetujui.

Mengawasi proses perencanaan pembangunan, Musrenbangnas demikian juga Bappenas akan menyampaikan rancangan awal RKP, menyampaikan *mayor project*, finalisasi prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas dan pagu anggaran, stakeholdernya adalah DPR, KL, Pemda serta stakeholder terkait. Peranan DPR adalah menyampaikan aspirasi, mengadilkan alokasi anggaran. Saya garis bawahi, mengadilkan alokasi anggaran dan mengawasi proses perencanaan pembangunan, karena dulu saya di DPR. Jadi saya tahu bagaimana mengadilkan alokasi anggaran itu.

Terakhir adalah tentang persiapan Ibu Kota Negara. Pertama, Ibu Kota Negara ini harus *the best on earth*, simbol identitas bangsa, modern dan berstandar internasional, *smart, green, beautiful, sustainable*, tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif, pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. Kemarin kami berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk pihak-pihak internasional, mereka mengatakan sebaiknya Ibu Kota Negara Indonesia yang baru itu menjadi laboratorium, laboratorium dunia, karena ini

untuk pertama kali dunia atau bangsa manusia yang hidup di muka bumi untuk pertama kali memindahkan Ibu Kota Negara dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu belum pernah terjadi dan inilah yang pertama kali. Dan juga dengan kehirukpikukannya yang ada di dalamnya, itu luar biasa. Jadi mereka ingin melihat itu. Apa lagi kalau *centre of gravity*nya itu akan dipindahkan sekaligus, mereka akan melihat. Jadi saya kira mata dunia seperti menonton final sepak bola. Final sepak bola dimenangkan oleh siapa dan mudah-mudahan benar-benar kita menjadikan *the best on earth*. Jadi laboratorium, inovasi, solusi pembangunan perkotaan di Indonesia. Itu bunyinya Pak. Kalau sudah mantuk-mantuk setuju berarti.

Pelayanan dasar harus menjadi *nature based city and publik spaces*, energi yang terbarukan, *low emission city*. Saya kemarin sudah mencoba mobil dengan pakai hidrogen ...(rekaman terputus)... memerlukan 50 uero. Saya cobanya bukan di Jakarta Pak Misbakhun, jadi jangan begitu. Saya mencobanya di tempat lain. Kemudian kalau pakai bensin euro 4 ya uero 3, itu 60 euro dapatnya, kemudian kalau pakai *biofuel* itu 78 euro. Listrik mungkin lebih murah, bisa di bawah 50 euro kata mereka, tetapi berat, buat mobil berat. Jadi kecepatannya itu tentu akan berkurang kalau dengan baterai, kalau ini hanya dengan hidrogen dan hidrogennya itu saya sudah menyaksikan sendiri ada dispenser, saya punya mobil diisi oleh Saudara Kennedy, mana Kennedy? Oh mewakili saya tadi. Jadi Pak Kennedy yang mengisi mobil saya itu supaya bisa hidup kembali. *Fuel tank* 5 kg. Jadi satu 5 kg itu bisa untuk 600 KM. Jadi bisa Jakarta-Bandung, pergi-pulang. Jadi Jakarta ke Bandung, balik lagi ke Bandung lagi. Jadi Jakarta-Bandung-Jakarta-Bandung lagi, ya enteng sekali dan hampir tidak ada bunyinya.

Saya kira Komisi IX harus mencobanya itu. Yang diundang tentu bukan hanya Pak Erik, Eriko. *Smart and integrated public transportation, intelligent city, digital hub dan integrated infomation system, smart water management*. Kalau bisa kita di Ibu Kota Negara itu bisa minum dari air kran. Jadi sudah *drinkable tap water*. Luar biasa. Kemudian *smart waster management*, kalau bisa *waste to energy, integrated (suara tidak jelas)*, kemudian *resilient city*. Layanan bagi sektor industri ada Universitas Internasional, *research and high tech industries*, ada smart hospital, ada industri digital dan inovasi, ada tenaga surya dan *biodiesel*, ada daerah destinasi baru, untuk *MICE* dan *natural attractions* dan dia bukan hanya jadi *trensetter* nasional, tapi juga bisa menjadi.. kalau *trensetter* nasional untuk standar bagi layanan kota-kota di Indonesia, jadi standar dunia.

Jadi maksud kami begini, kalau kita membuat Ibu Kota itu nanti, kita berharap kalau seluruh kota-kota di Indonesia itu juga naik pangkat, bukan Ibu Kota saja yang hebat, tetapi kota-kota itu ikut terangkat. Jadi kalau misalnya ada air kran bisa diminum, maka semua kota itu mengapa tidak mengarah ke sana. Jadi Pak Elnino itu di Gorontalo dia tidak susah lagi minum air, langsung bisa mengucur di krannya. Jadi ada lompatan untuk penyediaan layanan dasar dan layanan bagi sektor industri dari layanan dasar yang ada saat ini, jadi kita meloncat.

Tahap-tahapnya adalah tentu harus ada tahapnya, 2019 kita sudah lalui semua dan hasilnya ada pra masterplan. Dan Tahun 2020, kita akan mulai dengan masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang, kawasan, kemudian pembahasan RUU Ibu Kota Negara. Undang-Undang ini sudah kami susun dan sekarang sedang dalam proses sirkulasi di Kementerian.

Kemudian penetapan Perpres tentang Badan Otorita Ibu Kota. Persiapan organisasi Badan Otorita Ibu Kota yang direncanakan hanya untuk mempersiapkan sampai memindahkan, setelah itu nanti ada pemerintah yang kita sebut Pemerintah Ibu Kota Khusus, Pemerintah Ibu Kota.

Kemudian oiya sebagai awalan saja di Undang-Undang ini, mungkin di komisi lain, tetapi saya ingin menginformasikan saja. Memang agak kita memiliki sedikit kesulitan, seperti kita tahu di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1) itu mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota. Tetapi kemudian Pasal 18 B Ayat (1) dan Ayat (2), itu ada pengecualiannya, yang mengakui pembentukan daerah istimewa maupun Daerah Khusus. Jadi daerah khusus Ibu Kota bisa boleh jadi menjadi daerah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar ini, dibuka. Jadi sekarang kita sudah punya Aceh, DKI dan juga Yogyakarta.

Nah ke depan kita mungkin Jakarta tetap seperti, cuma bukan daerah khusus Ibu Kota, tapi daerah khusus industri atau daerah khusus apa gitu, daerah khusus Jakarta, kemudian Yogyakarta dengan sebagai daerah istimewa, kemudian Aceh dan terakhir adalah Ibu Kota Negara.

Dan di sana dalam diskusi kami, itu tidak ada pemerintah daerah, jadi dia dikelola oleh pemerintah pusat. Artinya yang mengawasi adalah DPR RI langsung. Jadi tidak ada DPRD/Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/kota. Itu kira-kira inti dari Undang-Undang IKN.

Kemudian bagaimana cara menunjuk pimpinannya? Itu dikonsultasikan pada DPR. Pada tahun 2021 diharapkan kita sudah bisa mengawali *ground breaking*, kemudian tahun 2022 bangunan fungsi pendukung hunian rumah sarana dan prasarana, kesehatannya lainnya sudah ada, jaringan telekomunikasi tahun 2023, penyiapan lahan diplomatik *compound*, *upgrading* bandara dan pelabuhan termasuk tahun 2023 ini seluruh senayan itu mungkin dipindahkan ke sana. Jadi sudah mulai bisa mungkin pelantikan Anggota DPR yang akan datang itu di 2024, itu di Ibu Kota Negara. Jadi yang tinggal di Jakarta akhirnya menjadi orang daerah.

Tahapan pembangunan, tahapan pembangunan. Jadi itu luasnya 256 ribu. Kemudian ada kawasan Ibu Kota Negara 56 ribu, kemudian Daerah Pemerintahan 5.600. Selisi dari 256 ke 56 itu, itu ada daerah-daerah penyangga dan daerah industri lainnya, mungkin *nasional park*, sektor ekonomi yang akan dibangun yang lainnya. Kemudian kalau di 56 ribu hektar itu, mudah-mudahan sampai tahun 2029 itu, sudah ada *universitas sains* dan *techno park* dan *hightech* dan *clean industry*. Tadi saya datang Universitas Pertamina, saya minta mereka kerja sama dengan Universitas di luar negeri mengembangkan energi baru dan terbarukan, sekaligus membuat universitas yang terkemuka di dunia di kawasan Ibu Kota Negara.

Apakah Ibu Kota Negara ini bisa menjadi *enabler* atau pendorong, *premove* pemerataan ekonomi ke wilayah di Indonesia? Itu seringkali sampaikan pernyataan yang ada pertanyaannya kepada kami. Pertama, jangka pendek untuk Kalimantan Timur tentu akan terjadi peningkatan investasi riil 47,7%, di Pulau Kalimantan sendiri terdapat 34,5%, Indonesia 4,7%. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur akan naik 7,3%, di Pulau Kalimantan akan naik 4,7%, kemudian di seluruh Indonesia akan naik 0,6%. Diperkirakan *share* BDRB Pulau Kalimantan naik dari 8,8% pada tahun 2024,

sekarang ini *share* terbesar Jawa dan Bali 58%, kemudian Sumatera 21,79%, Sulawesi 6,3%, Maluku hanya 0,5%, Papua hanya 1,9%.

Selanjutnya strategi pengembangan ekonomi Ibu Kota Negara dan Kalimantan Timur. Di kawasan inti pemerintahan adalah pemerintahan layanan publik, kemudian di lingkaran berikutnya adalah ada farmasi, pendidikan tinggi, kesehatan, kemudian pariwisata, industri berteknologi tinggi, industri digital dan selanjutnya adalah industri *oleochemical*, petrokimia, industri hulumigas, pertanian, pertambangan berkelanjutan, *clean tech by biodiesel manufactory*. Ini inspirasi untuk masa depan Indonesia.

Selanjutnya adalah rencana pemindahan Aparatur Sipil ke Ibu Kota Negara. Yang akan dipindahkan Lembaga Negara, Alat Negara dan Sekretariat Lembaga Negara, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet dan Sekretariat Lembaga-lembaga Negara. Kementerian, semua Kementerian yang nomenklaturnya disebut dalam Undang-Undang Dasar, yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar, Kementerian yang pelaksana tugasnya yang berkaitan dengan Penajaman. Jadi ini kan ada kategori 1, 2, 3 sebagaimana Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Kemudian yang ketiga, Lembaga Negara non Pemerintah, non Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Lembaga non Struktural.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis, itu ada mangrove di plot di Delta Mahakam, ada jalur migrasi buaya, lumba-lumba, lumba-lumbanya itu lucu, hidung botol, tapi jangan main-main, serta Dugong, Dugong atau Pesut. Jalur..

Bukan begitu, yang terhormat Pak Misbakhun.

Berbahayanya kalau terjadi perdebatan yang tidak selesai, jangan dibuang ke lubang buaya.

Kemudian di Bukit Soeharto itu ada habitat satwa Beruang, kalau tidak berkelahi dengan Beruang, ada Macan Dahan, ada Bekantan, ada Burung Enggang, Kera dan sebagainya. Flora penting seperti *Sorea spp species*. Di Teluk Balikpapan masih ada Bekantan, Pesut. Pesut itu katanya itu, iya air tawar, katanya dulu itu ada dongengnya itu Pak, dongengnya hampir sama dengan.. Ikan Duyung. Lumba-lumba hidung botol, Penyu Hijau dan hutan Mangrove. Jadi kaya sekali akan satwa.

Kemudian kita harus mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, kita harus mengembalikan kerusakan kawasan hutan dan habitat flora dan fauna, memang akan ada potensi kehilangan produksi kayu hutan, tanaman 53 ribu meter/segi, m2/tahun, simpanan karbon 3 koma juta ton dan penyerapan karbon 60 ribu ton/tahun. Minimnya supply air baku. Ini isu pembangunan yang kita hadapi, sehingga arahan ke depan rencana pembangunan IKN yang memperhatikan keanekaragaman hayati dan daya dukung dan daya tampung, termasuk sumber daya air, itu menyusun konsep *forest city* pada kawasan inti Ibu Kota Negara, kita ingin bikin landasan ekosistemnya itu adalah *sponge city*, kemudian rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi kawasan hutan, pengendalian kegiatan budi daya yang potensi yang mengganggu kawasan lindung, pembangunan waduk untuk menjaga supply air baku. Pemohon waduk itupun yang ramah lingkungan.

Ada 109 lubang tambang baik dalam skala kecil maupun skala besar, butuh biaya sangat besar untuk reklamasi termasuk revegetasi, penanaman

ulang. Maka apa yang dilakukan? Solusinya adalah mengidentifikasi dulu dilakukan kerja sama dengan swasta, kemudian penanaman dengan menggunakan tanaman lokal, pemberdayaan masyarakat lokal dalam reklamasi dan penanaman kembali.

Bagaimana ini dibiayai? Ini dibiayai tentu dengan ada beberapa alternatif pembiayaan, tetapi dua yang kami akan sampaikan di sini. Pertama dengan pola KPBU atau dengan pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, kemudian dengan bentuk-bentuk BOT, BTO dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada juga dengan konsep model bisnis pelanggan atau *subscription*.

Saya kira itu baru bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini dan bersamaan juga dengan 53 pertanyaan yang telah kami jawab secara tertulis juga, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Sebelumnya saya ingin.. kemarin sudah memperkenalkan semua, tetapi mungkin ada yang belum hadir juga.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Sekarang saya memperkenalkan dua Staf Khusus, Saudara Ervan, kemudian Saudara Kartika Yudhisti, Anggota DPR 2014-2019.

KETUA RAPAT:

Kayaknya dua-duanya saya kenal.
Terima kasih Pak Menteri, teman-teman.

Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi XI,

Demikian tadi Pak Menteri sudah menyampaikan paparan, terkait dengan apa yang menjadi harapan dari teman-teman Anggota Komisi XI yang terhormat. Untuk itu, saya berikan kesempatan untuk melakukan pendalaman dan pertanyaan. Ini sebelum saya berikan kesempatan, saya mohon kita jangan melebihi dari 5 menit ya. Sepakat ya? Kalau ada yang bertanya lebih dari 5 menit, saya langsung potong. 3 menit cukup, tapi kalau ada yang 5 menit saya potong. Terus kalau ada yang mau mundur setelah memasukan data juga tidak apa-apa.

Baiklah, untuk yang pertama dari sebelah kanan saya persilakan Pak Andreas. Oke, kita mulai ke kiri Pak Marwan silakan, Pak Ketua BKN.

F-PD (Ir. H. MARWAN CIK ASAN, MM.):

Terima kasih Pak Ketua.
Saya Marwan Cik Asan Pak Menteri. A-535 Dapil Lampung II dari Fraksi PD.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi XI beserta seluruh anggota,
Pak Menteri beserta jajarannya yang terhormat,**

Saya senang sekali mendengar dan melihat paparan Pak Menteri pada pagi hari ini, ada optimisme untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Tetapi cita-cita besar ini kalau tidak didukung dengan ikhtiar yang serius dan strategi yang tepat, maka ini hanya akan menjadi mimpi, apa lagi kalau kita bicara tentang kondisi Indonesia pada hari ini.

Salah satu tulisan *globalitation productivity* dan *production, network in Asian*, menyatakan bahwa Indonesia baru bisa keluar dari *middle income trap* itu, kalau kita bisa tumbuh 6,5% hingga nanti tahun 2030. Di paper Bapak agak lebih rendah, 5,7 kita sudah bisa keluar dari *middle income trap*. Tetapi kalau kita bicara pandangan-pandangan berbagai lembaga dunia termasuk Bank Dunia, yang menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengalami perlambatan ekonomi, hingga nanti tahun 2022, 2023 bahkan di bawah 5%. Ini berita ini kita dengar bahkan sebelum Virus Corona merebak Pak Menteri. Padahal Bank Indonesia mengatakan bahwa setiap perlambatan 1% pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, maka akan menggerus 0,3% pertumbuhan ekonomi di Republik ini. Artinya, kalau ini kita jadikan salah satu paramater, maka pertumbuhan ekonomi kita akan lebih lambat lagi, sehingga cita-cita kita untuk keluar dari *middle income trap*, sepertinya hanya akan menjadi mimpi kalau kita tidak serius hingga hari ini.

Keseriusan kita tentu kalau kita bernegara ini, yang bisa kita kuasai sama-sama oleh eksekutif dan legislatif adalah APBN. Sayangnya di ABPN di 2020 yang merupakan APBN perdana dari Pemerintahan Presiden Jokowi di Periode 2019-2024, ternyata itu belum kita lihat gambaran keseriusan itu. Untuk itu Pak Menteri, supaya ini tidak menjadi mimpi, supaya ini tidak menjadi bencana untuk Republik ini, karena pada saat yang sama kita juga akan memperoleh bonus demografi, dimana anak-anak muda cerdas, anak-anak kita, cucu-cucu akan hadir dan hidup pada masa itu, ini harus kita benahi mulai hari ini. Kalau tidak, bonus demografi yang terjadi itu hanya akan menjadi bencana untuk kita manakala ekonomi negara kita akan melambat. Tidak banyak negara yang sukses untuk keluar dari jebakan *middle income* ini ya. Contohnya sekarang kalau kita mau lihat yang dekat, Amerika Latin, di Amerika Latin, Venezuela dan sebagainya.

Jadi ini saya mohonkan betul Pak Menteri, supaya *paper* Bapak ini yang bagus dan memberikan optimisme ini juga diwujudkan dalam rekomendasi, masukan dan strategi yang disampaikan pada Bapak Presiden supaya 2021 ini kita rubahlah Pak, APBN kita ini benar-benar menuju ini begitu lho. Jangan kita mimpinya ke kanan, tapi APBN kita ke kiri, karena hanya APBN nya yang betul-betul kita kedalikan sepenuhnya gitu. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini, 20 tahun terakhir ini, kita bicara didominasi oleh faktor

konsumsi dalam negeri. Nah ini juga tidak menjadi perhatian. Ini Pak yang pertama Pak, tentang pertumbuhan ekonomi, saya khawatir sekali.

Apa lagi kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh ekonomi kita Pak Fasial Basri, bahwa ada dua hal penting untuk kita bebas dari *middle income trap* ini, yang pertama adalah jumlah orang yang mendaftar ke sekolah menengah atas dan.. sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Untuk sekolah menengah itu paling tidak itu 100%, artinya seluruh anak kita SD itu mesti sekolah semua, tidak boleh tidak ada yang tidak sekolah. Sementara data Bank Dunia tahun 2018 itu baru 83%, ada 17% yang tidak mendaftar ke sekolah menengah. Kemudian untuk yang sekolah atas, itu paling tidak itu 76% syarat Bank Dunia itu kalau kita mau keluar, harus mendaftar. Tapi di Republik ini tahun 2018, itu baru 36%, berarti sebagian besar tidak melanjutkan sekolah ke sekolah atas. Ini yang kita bicara bonus demografi yang akan menjadi bencana nanti, umurnya besar, tetapi produktifitasnya rendah, *skill*-nya rendah, karena dia tidak sekolah tidak terdidik.

Syarat yang kedua yang saya baca adalah perlu produk-produk *high tech* untuk ekspor kita. Sementara kenyataannya di Republik ini, tahun 2012 produk-produk *high tech* kita itu masih 10%, tapi kenyataannya di tahun 2018, turun menjadi 8%. Berarti yang kita kirim bukan produk-produk yang berteknologi tinggi ya, mungkin hanya kerajinan-kerajinan saja. Padahal Vietnam sudah bisa mengirim ekspor produk manufakturnya 41% *high tech*, Malaysia lebih tinggi dari pada itu. Nah ini yang pikir perlu masuk dalam strategi Bappenas. Berapa menit lagi Pak Amir? Saya paling takut dipotong sama Pak Amir ini.

KETUA RAPAT:

Masih ada satu setengah menit lagi Pak.

F-PD (Ir. H. MARWAN CIK ASAN, MM.):

Baik.

Yang kedua Pak, tentang Ibu Kota Negara. Yang ketiga ya? cita-citanya pertanyaannya cuma dua Pak Menteri.

Tentang Ibu Kota Negara, apakah masih relevan, masih prioritas, kita mau memindahkan Ibu Kota Negara dengan kondisi kita pada hari ini? Darimana pula anggarannya? 460 triliun apakah dia dari BUMN, dari Swasta, dari apa lagi dari APBN, kalau kita mau menggunakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara, apa tidak sayang begitu lho dan saya pikir belum perlu sekali Ibu Kota Negara ini pindah. Dari zaman Bung Karno untuk berpikir pindah, Pak Harto menyiapkan Jonggol, Pak SBY melakukan studi, Pak Jokowi juga bolehlah kalau bercita-cita pindah, tapi jangan pindah kalau menurut saya. Lebih baik uangnya 460 T itu dari manapun bisa masuknya, kalau dia bisa masuk ke Republik ini, kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional ini. Di bidang investasi, di bidang bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakat, apa lagi kalau saya lihat di *paper* Bapak tadi Pak. Pemindahan Ibu Kota Negara itu hanya memberikan kontribusi kenaikan pertumbuhan 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sayang Pak, 460 T atau 400 T itu kalau digunakan di sana.

Jadi saya mohon Pak, sampaikan kepada Pak Presiden, karena kami bukan Partai Koalisi Pak, tapi kita cinta NKRI. Tolong pikirkan kembali memindahkan Ibu Kota Negara ini, apakah sudah *urgen* ini Pak. Coba kita pikirkan kembali, apakah kita tetap di Jakarta, ataukah kita cari tetap di Pulau Jawa, apakah kita tetap, apa lagi tadi Pak Menteri bilang, pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau ini akan menjadikan laboratorium. Setahu saya Pak, kalau yang namanya laboratorium itu, bisa gagal, bisa sukses. Iya kalau sukses Pak, kalau gagal bagaimana. Kita tidak mungkin mengulang kembali sekian banyak langkah kita, sekian besar uang yang sudah kita keluarkan, sekian energi yang sudah kita keluarkan, masa kita mau pulang lagi ke Jakarta Pak. Coba kita ketuk nurani kita Pak Suharso ini bukan cuma Menteri, tapi negarawan Pak. Jadi saya pikir hanya orang-orang seperti Bapak yang bisa menyelamatkan Republik ini, dari jalan yang tidak baik menjadi jalan yang lebih baik.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

Menteri Negara PPN/Bappenas beserta jajarannya,

Saya Andreas Eddy Susetyo, Daerah Pemilihan Jawa Timur V, Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Nomor Anggota A-214 dari Fraksi PDIP.

Jadi yang pertama mengenai cita-cita untuk Indonesia menuju negara maju Pak. Saya kira ini memang satu tantangan yang luar biasa, karena contohnya pertama adalah bagaimana kita mendorong industri pengolahan. Padahal kita tahu bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap PDB kita semakin menurun Pak. Nah pertanyaannya adalah kita belum melihat *road map*nya Pak, apakah kita mau ini mau menyasar (rekaman tidak jelas) melebar atau kita spesifik, *targeted*. Karena kita tahu sebetulnya, industri pengolahan yang bisa berhasil itu bagian dari *global value chains*, walaupun dengan *conditions effects* karena Corona ini menjadi pertanyaan. Tetapi yang terjadi adalah kalau kita membandingkan katakanlah eskport kita TPT kita, eskport textile kita dibandingkan misalkan eskport satu produk industri dari elektronik dari Samsung misalnya. Itu bisa kelihatannya perbedaannya. Nah ini yang belum kita lihat jadi.

Jadi bagaimana Bappenas di dalam mewujudkan cita-cita ini, kendali terhadap rencana RKP yang ada di masing-masing Kementerian ini Pak? Di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bagaimana sinkronisasinya? Ini menjadi kata kunci. Kami terus terang saja kalau bisa dijelaskan bagaimana gambarnya untuk ini? Karena menurut saya selama ini, ini selalu menjadi bahan yang disampaikan juga Pak di dalam pembahasan

mengenai RKP kita, tetapi kenyataannya angka sektor kontribusi pengolahan ini selalu malah di bawah bahkan kontribusinya semakin menurun. Ini yang pertama.

Terus yang kedua, mendorong sektor pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif, itu hal yang memang sangat tepat. Tapi satu hal Pak, yang sebetulnya potensi besar kita yang belum betul-betul dioptimalkan, yaitu mengenai pemberdayaan UMKM kita melalui Kewirausahaan. Saya lihat cuma ada di agenda pertama, tetapi bukan menjadi prioritas utama Pak. Saya terus terang saja sebagai bekas Ketua Pansus RUU Kewirausahaan, sebetulnya yang menjadi fokus kita, kalau kita bisa menaikkan kelas UMKM kita yang kebanyakan yang ada di Usaha Mikro ini Pak, itu sebetulnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDB nya sudah sangat jelas sekali Pak. Nah ini saya lihat memang ada di agenda ekonomi pertama, tetapi tidak menjadi... menurut saya ini adalah sebetulnya UMKM kita ini *sleeping giants* kalau kita bisa optimalkan. Bayangkan saja kalau dari yang 56 juta itu, 10% saja bisa naik kelas, ini sudah luar biasa Pak. Jadi ini mungkin yang menjadi catatan kami.

Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat di sasaran pembangunan 2020 dan 2024, coba ditayangkan. Ini menarik karena di sini disebutkan bahwa dan ini kalau kita sepakat kita di Komisi XI dan Bappenas, ini menjadi acuan kita, coba di tayangkan. Sasaran pembangunan 2020, 2024 pembangunan yang berkualitas. Karena di sini dimasukkan.. pembangunan yang berkualitas. Nah ini dimasukkan kalau kita sepakat, pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran. Padahal selama ini kita di dalam pembahasan RKP pertumbuhan ekonomi ini hanya menjadi asumsi makro ekonomi. Ini perdebatan kita yang waktu itu sangat tepat. Jadi kalau memang kita sepakat, ini akan kita jadikan acuan, ya karena kita bicara RPJM. Iya artinya berarti kalau kita memasukan di dalam sasaran pembangunan, target pembangunan kita, ini semua yang akan kita masukan. Ini mohon untuk dikonfirmasi. Selama ini, ini perdebatan kita dengan Kementerian Keuangan, karena mereka ingin pertumbuhan ekonomi sekedar sebagai asumsi makro ekonomi. Ini sangat penting. Karena kalau target, sasaran, ini akan menjadi sesuatu yang akan kita monitor, kita evaluasi dan selanjutnya kita awasi pelaksanaan maupun pencapaiannya, tetapi kalau asumsi, lain masalah. Jadi ini mungkin sesuatu yang perlu mungkin kita matangkan di dalam diskusi kita, karena ini adalah bagian dari RPJM, sehingga ini menjadi menarik.

Yang ketiga. Waktu saya tinggal berapa Pak Amir?

KETUA RAPAT:

Masih satu menit Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Kemudian tahapan penyusunan RKP. Saya kira menarik di dalam tahapan penyusunan RKP, karena itu saya menyarankan kepada teman-teman di Komisi XI, agar kita menyusun agenda kita sesuaikan dengan tahapan penyusunan RKP ini, sehingga kita ini mempunyai tadi kan berkali-kali Pak Suharso mengatakan bahwa fungsi DPR sebagai katakanlah tadi penyeimbang alokasi anggaran yang adil dan seterusnya, bisa berfungsi. Tetapi kalau ini kita tidak masukkan, jadi teman-teman saya mohon, supaya kita juga mencoba

mengakomodasi *schedule* di dalam agenda kita, sehingga betul-betul ini bisa kita optimalkan. Untuk itu kita bisa memulai dalam rangka kunker, kunjungan kerja reses, Bappenas tidak pernah kita ajak. Nah untuk itu maka kita agendakan bersama Bappenas.

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas. Pas 5 menit kurang 2 detik.

Silakan Ibu Siti Mufattahah.

F-PD (HJ. SITI MUFATTAHAH, P.Si.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

Perkenal Pak Menteri, saya Siti Mufattahah dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jabar XI dari Garut dengan Tasikmalaya wilayahnya.

Pak Menteri,

Tadi sudah disampaikan paparan yang sangat bagus, sama dengan apresiasi yang diberikan oleh teman-teman sebelumnya. Namun yang perlu kita pikirkan yaitu untuk membuat sebuah kebijakan pasti kita harus pikirkan ada positif dan negatifnya. Nah untuk memikirkan masalah positif negatif ini harus betul-betul matang Pak Menteri. Menurut saya dari beberapa kajian yang dilakukan, sisi positifnya memang akan ada perkembangan bisnis layanan berbagai layanan di sana itu akan berkembang dengan baik dengan pesat di sana. Namun sisi negatifnya adalah yang perlu dikhawatirkan, diwaspadai adalah mengenai inflasi. Inflasi ini menjadi topik yang perlu kita perhatikan jika kita pindah Ibu Kota baru. Karena jika pemindahan dilakukan secara mendadak dan cepat, maka perekonomian regional dan nasional bisa mengalami *shock* atau guncangan.

Selain itu juga adanya kesenjangan SDM, daerah yang masih terasa sampai saat ini yaitu antara pulau Jawa, SDM pulau Jawa dengan SDM di luar pulau Jawa, ini akan menjadi kendala nantinya dalam pemindahan Ibu Kota baru. Yang tadinya kita harapkan dengan adanya pemindahan Ibu Kota baru ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sana, namun dengan kurangnya kajian yang berkaitan dengan SDM ini, nanti malah ujung-ujungnya orang Jakarta lagi yang balik ke sana. Kemudian juga SDM-SDM yang dari wilayah yang sudah bisa dikatakan maju, yang akan bekerja di sana dan tentunya kalau ada pemindahan yang seperti itu, maka tetap saja nanti pendapatan dan penghasilan warga negara kita ini tetap diperoleh oleh SDM-SDM yang maju. Itu berkaitan dengan SDM.

Nah kalau dilihat dari sisi positif dan negatif yang mungkin dari tingkat yang inflasi yang seperti ini, maka menurut saya tidak terlalu penting saat ini,

tidak terlalu *urgen* saat ini untuk bisa pindah Ibu Kota, karena kalau alasannya pemindahan Ibu Kota ini adalah pemerataan pembangunan sebagai afirmasi dari kebijakan ini, maka itu tidak tepat menurut saja, karena dulu sudah semangat pemerataan pembangunan itu sudah dipikirkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, yaitu dengan adanya otonomi daerah. Nah dengan adanya otonomi daerah harusnya, cara-cara untuk lebih fokus kepada hal-hal perekonomian itu menjadi sangat penting. Dan dengan adanya Ibu Kota ini, Ibu Kota baru ini, mungkin bisa menjadikan satu *shock* tertentu nantinya jika tidak dipikirkan secara maksimal.

Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat, saya lihat tadi Pak Menteri baru bisa berani di sekitar 5,7 sampai 6 saja, tapi menurut saya kalau untuk kita bisa melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi atau melakukan sesuatu yang besar, pemindahan ekonomi yang ini merupakan proyek besar, maka di atas 6 seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi di atas 6,5 baru kita *firm* bisa melakukan apapun yang bisa kita inginkan nantinya, cita-cita itu bisa akan tercapai dan itupun ...(**rekaman terputus**).. menjadi catatan kita bersama. Makanya saya tidak yakin bukan kita seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa kita harus optimis, apapun harus optimis. Yak kalau kita optimis didasarkan dengan data-data dan kemampuan yang bagus, bolehlah kita optimis, tapi kalau kita sedikit harus mengantisipasi, maka itu sangat penting membuat suatu kebijakan sangat besar seperti ini. Dan apa lagi kebijakan yang disampaikan tadi, kita tidak memikirkan bagaimana kalau kita melakukan satu yang besar dan itu tadi disampaikan uangnya dari mana.

Satu lagi Pak Ketua. Satu lagi sedikit lagi satu menit lagi.

KETUA RAPAT:

Menambah berarti.

F-PD (HJ. SITI MUFATTAHAH, P. Si.):

Sebentar ya Pak Menteri.
Jadi saya ingin.

KETUA RAPAT:

Atau kita kasih putaran kedua Ibu Siti ya, supaya yang lain-lain dapat ya, soalnya banyak ini.

Terima kasih Ibu Siti ya.

F-PD (HJ. SITI MUFATTAHAH, P. Si.):

Belum *diclosing* ini Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Diclosing saja.

F-PD (HJ. SITI MUFATTAHAH, P. Si.):

Diclosing ya.

Baik, jadi kalau mau pindah intinya jangan pinjam uangnya. Coba cari bagaimana uang itu jangan pinjam dan tidak mengganggu APBN. Intinya itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih Ibu Siti.

Sama dengan Pak Marwan ya.

Oke, atas seijin Pak Elnino dengan Ibu Anis, Ibu Vera minta mendahului.

Silakan Ibu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih, terima kasih.

Izin Pimpinan, Pak Menteri karena kami harus rapat fraksi. Ini karena kami agenda dengan Pimpinan DPR ditunggu jam 12.

Terima kasih, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati beserta para jajarannya, dan Rekan-rekan Komisi XI.

Ketika saya membaca penyampaian atau materi Bapak ini memang sangat optimis. Ini pengalaman Pak Menteri sebagai Anggota DPR RI sudah tertuang di sini. Minimal menggaris atau mewakili kami-kami yang ada di Komisi XI dan 575 anggota. Inilah kalau Menteri dari Anggota DPR seperti itu, sehingga belum pernah saya melihat Menteri Bappenas secara *stated* mengatakan daerah pemilihan DPR sebagai stakeholder sesuai dengan daerah pemilihan itu, itu maknanya luar biasa. Terima kasih. Nanti kita diskusi untuk sesi khusus Pak Menteri untuk persoalan itu.

Pertanyaan saya, saya membaca di materi Bapak di langkah pikir 7 agenda pembangunan, saya ini menanyakan mengenai pembangunan SDM. Perlu untuk ada penekanan untuk pembangunan SDM terkait dengan *stunting*, ini Bapak belum menyampaikan. Mengenai tingkat terbuka pengangguran itu kalau kita lihat tingkat pendidikan tertingginya itu ada di SMK dan menurunnya kesenjangan antara kota dan desa. Nah ini mungkin menjadi perhatian Pak Menteri dan Bappenas, bagaimana bisa melakukan perbaikan ataupun program terhadap *stunting* tersebut. Tadi juga kita lihat terhadap, karena itu masuk di dalam Visi-Misi Presiden Jokowi pada saat itu *stunting*.

Dan yang kedua, mengenai pembangunan infrastruktur. Saya melihat di sini bahwa perlu adanya penekanan pada bebas fiskal terhadap *magnitude* pembangunan infrastruktur, karena sampai saat ini kita tahu dari tahun ke tahun dilihat dari penerimaan negara selalu tidak tercapai. Tentunya Bappenas atau Pemerintah perlu mempertimbangkan Badan Usaha atau KPBU ditingkatkan kembali. Namun skemanya dan *road map*nya juga harus

dijelaskan kepada Komisi XI, nanti mungkin dengan para deputi yang akan menyampaikan pada sesi khusus nanti. Kita ingin tahu apakah proyek-proyek atau program-program (suara tidak jelas) untuk 20 ke depannya seperti apa 20 dan 21, karena itu sangat menarik ketika kita membahas detail. Dan nanti tolong disiapkan saja Pak Menteri bahan-bahannya secara keseluruhan untuk proyek-proyek strategis untuk pembangunan strategis.

Dan yang ketiga adalah mengenai, kalau kita lihat di sini Pak, ada sebagai persyarat kondisi penyederhanaan mengenai regulasi, birokrasi, stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Ini juga ada kaitannya dengan *Omnibus Law* kalau kita lihat. Bagaimana regulasi dan birokrasi itu disederhanakan dalam rangka meningkatkan investasi. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana apakah ini akselerasi *Omnibus Law* atau sebagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan? Nah ini *magnitude* seperti apa, dampaknya terhadap Undang-Undang *Omnibus Law* yang akan diundangkan? Apakah investasi itu akan tumbuh atau seperti apa?

Dulu ketika kita bahas KUP, Pak Menteri masih ingat, Ketentuan Umum Perpajakan, itu di dalam waktu masa dua periode. Kita mempunyai target mengenai pajak rasio kita bisa mencapai angka 13% pada saat itu, tapi sampai saat ini masih diangka 11% dari rasionya 10,4. Jadi belum mencapai di angka 11, dulu impiannya 14%. Namun setelah diundangkannya KUP, satu tahun berjalan, penurunan pajak itu sangat drastis *short fall*, karena itu pengaruh dari Peraturan Undang-Undang yang baru. Tapi setelah itu kita berhasil, berhasil mencapai pajak tertinggi pada saat itu saya ingat dengan Dirjen yang lalu dan luar biasa. Selama hampir 10 tahun pemerintahan yang lalu, itu pajak selalu tercapai, sehingga kontribusi terhadap mengenai angka pertumbuhan itu pernah mencapai dalam angka 6% di dalam kondisi pada saat itu kita tahu ada (suara tidak jelas), dan di situ ada krisis Yunani, ada krisis Eropa, luar biasa di dalam kurun 10 tahun, pada saat itu banyak sekali krisis-krisis yang melanda ekonomi global.

Nah ini kita tahu sekarang ada krisis Corona dan ada juga *trade war* belum juga kita lihat nanti mengenai pelaksanaan *Omnibus Law*. Kira-kira seperti apa dampaknya atau bagaimana Bappenas harus mempersiapkan itu semua terhadap transformasi tersebut?

KETUA RAPAT:

Waktunya Ibu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Dan yang terakhir mengenai pemindahan Ibu Kota.

Saya pernah waktu itu kami kunjungan Komisi XI itu ke Brazilia, itu kota luar biasa indahnya pada saat itu dan sekarang kita tahu itu kota ada sebagian pembangunan yang mangkrak saya melihat. Tolong dipikirkan karena itu menjadi semua hampir semua di beberapa negara itu mengatakan bahwa, Brazilia itu adalah di cap sebagai Ibu Kota yang gagal dan tidak berhasil. Itu disampaikan pada saat itu dari beberapa peneliti, di Harvard dan beberapa peneliti internasional mengatakan bahwa 50 tahun setelah mangkrak, bagaimana kita menjamin bahwa Ibu Kota pemindahan Ibu Kota yang baru itu tidak akan terjadi seperti kasus di Brazilia? Harus jelas ini Pak. Dan ini kita tahu

bahwa Brazilia ini dari segi geopolitiknya dari segi kawasannya juga sangat stretegis dengan Amerika.

Jadi itu saja dari saya. Tentunya pemindahan Ibu Kota ini harus didalami secara mendalam dan juga harus dipikirkan ke depannya.

Terima kasih dari saya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Vera.

Selanjutnya sebelah kiri Pak Satori.

F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi.):

Terima kasih.

Seizin Pimpinan Komisi XI,

Yang terhormat Bapak Menteri PPN/Bappenas dan Stafnya.

Tadi saya menyimak penyampaikan dari Pak Menteri, di halaman 34 sedikit melegakan hati kita, mudah-mudahan menjadi realisasi. Berkaitan dengan mengadakan alokasi anggaran Pak. Terima kasih Pak Menteri.

Kemudian kita lihat di halaman 34 eh halaman 41. Pada halaman 41, Ibu Kota Negara sebagai pendorong pemerataan ekonomi ke wilayah lain di Indonesia. Apakah tolak ukurnya Bapak? Sedangkan dalam kenyataannya masih berpusat di Jawa, yaitu sebesar 58%. Apakah dengan pemindahan Ibu Kota, dapat meratakan ekonomi? Sepertinya kurang berpengaruh apalagi dengan waktu yang sangat singkat yang diperkirakan tahun 2024. Itupun di Kalimantan diperkirakan hanya naik 0,3% dari 8,5 menjadi 8,8%.

Kemudian beberapa waktu yang lalu, kita lihat *statement* Pak Presiden Jokowi bahwa Ibu Kota Baru hanya untuk mobil listrik, selain itu tidak boleh. Memang itu bagus Pak, sesuai dengan agenda pembangunan lima, kiat lihat di halaman 18 itu, yaitu energi dan ketenagalistrikan. Apakah sudah diuji coba mobil listriknya sekiranya tersedia tidak? Kemudian teknisnya seperti apa? Jangan sampai kita sudah memberikan informasi-informasi yang indah, yang manis kemudian pada kenyataannya Ibu Kota baru bakal seperti apa Pak, karena realisasinya kita mungkin masih cukup makan waktu.

Itu barangkali Pak Menteri, tidak sampai 5 menit Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Satori.

Selanjutnya sebelah kanan, Pak Elnino. Silakan.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN, ST.,M.Si.):

Baik.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri yang terhormat,

Pertanyaannya sederhana, cuma dua. Yang pertama adalah bahwa saya melihat di paparan yang barusan Pak Menteri, itu ada yang namanya titik-titik kawasan ekonomi maupun kawasan industri dan rupanya di Sumatera itu, kawasan industrinya atau kawasan ekonominya sampai ada 20 titik, sementara di Sulawesi hanya 4 titik. Nah kita berharap ini bisa ditambah kan, karena ini RPJM, berarti efeknya bisa lama Pak Menteri. Kita berharap di Gorontalo dan juga Sulawesi Tenggara, itu juga bisa ada yang kawasan ekonomi atau industri yang cocok dengan tempat itu. Mengenai industrinya seperti apa, ekonominya seperti apa kita bisa diskusikan kemudian.

Yang kedua Pak Menteri, ini sebenarnya saya mengenai Ibu Kota ada pertanyaan yang sangat sederhana Pak Menteri, yaitu nanti Ibu Kota ini mau dinamakan apa, namanya apa itu? Ini nama tempatnya harus ada, tidak bisa kita, saya dari tadi mencari-cari di sini tidak ada Pak Menteri, cuma disebut IKN Ibu Kota Negara, IKN dan Kalimantan Timur. Kita tidak tahu, entah dia mau jadi wilayah otoritaskah atautkah dia menjadi satu pemda sendirilah, entah itu perdebatannya lain, nanti di Komisi II akan ada perdebatan apakah akan ada perlu ada DPRD atau pemerintahannya seperti apa. Tapi ini namanya nanti apa? Namanya nanti kalau Kaltim nanti kita *confused* lagi, antara Kalimantan Timur yang ada sekarang dengan wilayah otoritas Ibu Kota itu. Orang-orang bertanya apa arti sebuah nama, bagi saya itu akan menjadi sangat penting nama itu, karena akan ada banyak kajian di nama itu, baik entah kajian *branding* atau kajian komunikasi sampai kajian *feng shui* dan segala macam orang akan mengkaji soal namanya ini, nama Ibu Kotanya ini. Kalau memang itu sudah ada, tolong disampaikan namanya apa. Kalau belum ada, apakah disebarkan atau bagaimana supaya dapat namanya itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Elnino.
Selanjutnya sebelah kiri Pak Dolfie. Silakan Pak.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi XI,
Yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya,**

Terima kasih atas paparannya, sudah memberikan pencerahannya kepada kita, tapi kalau bisa Pak tolong buku RPJMN nya kita dibagikan Pak, karena kalau kita *print* sendiri, lumayan tebal, satu halaman persatu itu, kalau buku lebih mudah kita Pak. Belum dicetak ya Pak? Anggarannya sudah ada kan Pak, Belum dicetak? oh *purposenya* baru keluar. Oke nanti disusul kalau begitu.

Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa RPJMN ini adalah sinkronisasi integrasi visi-misi Presiden yang pernah disampaikan pada saat Pilpres khususnya. Karena kami punya pertanggungjawaban publik juga ini Pak,

terhadap janji-janji Presiden pada saat kampanye. Nah setelah saya mencermati dari dokumen yang saya miliki dari visi-misi Presiden saat di KPU dengan beberapa yang disusun oleh Bappenas, ada beberapa isu yang tidak masuk. Coba *slide* 8. Minta tolong *slide* 8. Nah di *slide* 8 ini yang 9 misi ini memang judul-judulnya sesuai dengan yang ada Visi-Misi Presiden saat disampaikan kepada KPU.

Tujuh agenda ini adalah sesuatu yang baru yang belum ada mungkin ini hasil pemikiran setelah ditambahkan 5 arahan Presiden. Nah masalahnya di dalam 7 agenda pembangunan ini, terdapat isu-isu yang hilang yang tadinya ada di misi yang 9 misi itu Pak. Misalnya, ada reformasi pendidikan tidak dibunyikan. Reformasi pendidikan ini tujuannya salah satunya mengenai karakter bangsa berlandaskan Pancasila. Di dalam konsep RPJMN yang disusun, indikator mengukur keberhasilan dalam hal pendidikan, justru pisah. Misalnya itu. Itu yang dinomor satu di visi-misi.

Kemudian ada juga reformasi kesehatan Pak, tidak dibunyikan di dalam RPJMN. Padahal reformasi kesehatan ini penting, begitu juga reformasi pendidikan. Kemudian di nomor dua Misi, yang tidak dibunyikan di 7 agenda pembangunan, itu adalah terkait dengan sistem ekonomi nasional berlandaskan Pancasila juga. Itu kurang dibunyikan Pak di 7 agenda pembangunan.

Kemudian di Nomor Tiga Misi, tentang Ekonomi Kerakyatan Produksi berdasarkan petani dan sebagainya, juga kurang dibunyikan di tujuh agenda itu.

Yang terakhir yang kurang dibunyikan di 7 agenda, adalah Misi Nomor 8, dimana di situ ada reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Nah kurang dibunyikan di agenda pembangunan. Saya tidak menemukan dimana di agenda pembangunan itu judul terkait itu dan isinya sekalian.

Jadi mungkin nanti mohon ada penguatan-penguatan Pak terhadap itu, karena ini juga merupakan pertanggungjawaban publik apa yang pernah dijanjikan oleh Calon Presiden yang sekarang Presiden saat Pilpres kemarin.

Yang berikutnya mengenai Ibu Kota Negara Pak. Pro-kontra setuju dan tidak setuju biasa itu Pak, masalah di Pulau Jawa kalau kita lihat Televisi ditanya, semua hampir sebagian besar tidak setuju. Tapi sebaliknya Pak, masyarakat yang di luar Jawa di sekitar Kalimantan, Sulawesi, semua setuju. Jadi sekarang tinggal apa manfaatnya setelah Ibu Kota itu dipindahkan. Kalau ada proyek mangkrak Pak, jangan kita belajar seperti Vera bilang di Brazilia, jauh sekali Pak. Dulu-dulu ini Pak, banyak proyek mangkrak di Indonesia, nilainya sampai triliunan bahkan, tidak perlu kita belajar sampai Brazilia. Jadi kalau soal proyek mangkrak adalah bagaimana Bapak meyakinkan kita dari 400 triliun lebih itu, sumber pendanaannya dari mana Pak? Tadi ada beberapa alternatif, mulai dari KPBU, APBN, Pengelolaan BMN dan Swasta. Harapan kita yang dari APBN ini yang paling kecil Pak, dari 400 triliun itu, karena APBN kita harapkan menjadi stimulus terhadap perekonomian di tingkat bawah.

Nah kalau yang dari APBN kecil, kemudian yang KPBU berapa, yang BMN berapa, yang swasta berapa. Kalau ada kejelasan mengenai skenario pembiayaan pendanaan ini Pak, itu memberikan keyakinan kepada kita, bahwa ini bisa dilakukan dan tidak ada lagi proyek mangkrak seperti dulu-dulu itu Pak. Kalau kita mengelola hutang dengan benar waktu dulu-dulu Pak, itu karena kurs berubah saja, kita ketambahan hutang 1000 triliun loh Pak, selesai untuk membangun Ibu Kota, tapi pemerintahan yang dulu-dulu tidak *aware* terhadap

nilai tukar rupiah, mengakibatkan kita menambah hutang 1000 triliun bukan karena menambah hutang, karena perubahan nilai tukar. Nah misalnya dari segi kapasitas keuangan, sebenarnya ada potensinya, tinggal bagaimana mengelolanya.

Demikian Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dolfie, pas 5 menit.
Silakan sebelum Ibu Anis, di sebelah kanan Pak Sihar dulu.
Silakan, silakan Pak Sihar.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan dan kawan-kawan dari Komisi XI,
Selamat Pagi kepada Bapak Menteri Bappenas dan juga jajaran,
Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.**

Saya akan sependek mungkin Pak, karena teman-teman sudah memberikan latar belakang pandangan mereka, mungkin itu juga saya bisa menggunakan untuk mempercepat waktu.

Dari pemaparan Bapak Pak, tadi ada yang menarik Pak, ternyata kalau kita bandingkan dengan asumsi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, sepertinya ada sedikit kontras yang menarik Pak. Kalau di beberapa persentasi yang lalu dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, asumsi kita itu sekarang di 5%, tapi sekarang kita menggunakan target sekitar 6%. Tentunya ini semuanya untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita kita semua bahwa kita keluar dari *middle income trap*, yang harapannya di tahun 2045 mencapai 23.200 dolar. Nah kalau sebagai gambaran umum saja Pak sebagai *rule of time*, kalau di nvestasi itu Pak ada namanya *rule of seventy two* Pak. Jadi angka 72 dibagi dengan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, itulah jumlah tahun yang untuk mendoublekan investasi kita. Jadi mendapatkan 23.200 ini, dengan asumsi pertumbuhan 6%, maka kita membutuhkan waktu sekitar 3i tahun atau di 2051 berdasarkan *rule of time* itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mungkin nanti ada penguatan-penguatan di beberapa sektor-sektor pertumbuhan.

Nah ini ada resiko tambahan lagi Pak, yang mungkin juga saya bisa *share*. *Monetary policy* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan penurunan suku bunga 1% tahun lalu, itu transmisinya, itu agak lebih lambat diserap oleh pasar atau pasar uang atau perbankan. Nah dari sisi *fiscal folicy*, kita juga juga bergantung dari *government spending* yang kemudian dengan inisiasi dengan Bapak Presiden, nanti akan mengeluarkan Omnibus Law dan yang lain-lainnya, tentunya ingin mempercepat pertumbuhan tersebut. Tetapi kita tahu Pak, *fiscal policy* transmisi lebih lambat dari pada *monetary policy*. Jadi ada resiko-resiko yang harus dimasukkan di dalam pencapaian target pertumbuhan 6% tersebut.

Nah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kita kejar tadi Pak, ada beberapa hal yang menarik, bagi saya adalah energi yang baru dan terbarukan. Kita memiliki daerah 3T terpinggirkan, terluar dan termiskin itu sangat banyak dan kita mempunyai *sun raise* yang mungkin 300 hari dalam satu tahun. Jadi kita perlu memikirkan *road map* terhadap energi baru terbarukan, apakah itu *solar panel* ataukah *solar cell* atau *wind power* ataupun namanya untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah yang terpencil.

Di dalam persentasi tadi juga Pak, kalau tidak salah saya hitung-hitung tadi ada kurang lebih total investasi itu 1.327,1 T untuk mendapatkan pertumbuhan 6%. Nah pertanyaannya, apakah investasi ini hanya dari pemerintah ataukah masuk juga dari bisnis sektor? Kalau dari besarnya sepertinya juga kombinasi, *government spending*, *government investment* dan juga bisnis sektor. Nah pertanyaannya adalah sekarang ini terutama dengan adanya inisiasi dari *fiscal policy* tadi yang akan di.. melaku Omnibus Law maupun rencana Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, apakah kita juga akan mempersiapkan lingkungan berbisnis yang lebih kondusif, produktif? Sehingga kita mendorong persaingan yang sehat. Ini akan menjadi menarik karena beberapa isu yang relevan saat ini tentunya adalah *labour* isu. *Labour* Isu kita sekarang ingin kita bisa paham bahwa buruh menginginkan *wedges* yang lebih tinggi, tetapi dari sisi lain dengan tekanan perekonomian yang ada saat ini, perusahaan-perusahaan mungkin harus berfikir efisiensi. Jadi *net effect* daripada *labour issue* ini terjadi *un employment*, menaikkan *un employment*.

Nah kemudian kita dalam 5 tahun ke depan ini menjalankan revolusi industri 1, 2, 3 dan 4 sekaligus Pak. Sekaligus 1,2,3 dan 4 karena masih banyak Saudara-saudara kita yang hidup dipinggir bantaran sungai itu revolusi 1.0.

KETUA RAPAT:

Waktu Pak Sihar.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Satu menit lagi Pak, kalau boleh seizin Pimpinan.

Nah jadi dengan *net effect* dari revolusi industri 4.0 ini sendiri juga jangan-jangan meningkatkan *unemployment*. Jadi dari sini bahwa Visi Presiden ingin meningkatkan kualitas SDM manusia Indonesia, maka di sini harus ada pemuatan yang super prioritas, supaya kita bisa memperpendek rentang revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Jadi mungkin saya lebih kepada pandangannya yang bisa saya berikan kepada Bapak Menteri dari pada pertanyaan Pak.

Demikian dari saya,
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sihar.
Selanjutnya silakan Pak Prof. Hendrawan.

F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terima kasih.

Hendrawan Supatikno Fraksi PDIP, A-201 Dapil Jawa Tengah X.

**Pak Menteri dan segenap jajarannya,
Rekan-rekan yang saya hormati.**

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama kami ingin menanyakan tentang evaluasi PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinergi atau Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Mengapa kami menanyakan ini? Karena sehebat-hebatnya perencanaan, nilainya tergantung dari realisasinya. Dulu banyak kita temukan yang direncanakan tidak ada anggarannya, yang dianggarkan perencanaannya tidak memadai. Itu sebabnya Mas Bambang Borojonegoro pada periode lalu kami beri pesan, *you* pernah menjadi Menteri Keuangan, pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan, ya itu sebabnya ini posisinya tepat untuk mensinkronkan dua Kementerian ini. Itu pertanyaan pertama. Karena jangan sampai masalah yang selalu terjadi antar terjadi dua kementerian ini tidak sinkron tetap masih terjadi.

Yang kedua, Bapak Menteri, 5 tahun pertama Presiden Jokowi mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, bahkan pada saat paket pertama diluncurkan 9 September 2015, pernyataannya bukan paket kebijakan ekonomi, paket penyelamatan, paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Menurut evaluasi sebuah lembaga independen, *delivery ratenya* dari paket-paket itu hanya ternyata 28%. Itu artinya 72% dari apa yang dijanjikan tidak bisa *deliver*. Saya di dapil saya semua orang menagih, karena keringanan biaya listrik paket kebijakan ekonomi nomor 3, sampai hari ini juga tidak muncul. Jadi mereka mengkritik saya sebagai wakil rakyat, kamu jualan pepesan kosong. Nah sekarang diganti Omnibus Law. Seperti (suara tidak jelas). Saya khawatir kalau tidak direncanakan dengan baik, koordinasi dan sinergitasnya tidak baik, maka hal yang sama akan terjadi dan kita akan bertemu 5 tahun lagi dalam suasana tangis-tangisan seperti ini.

Yang ketiga yang terakhir, John Kennedy pernah mengatakan, gelombang pasang menaikkan semua kapal, tetapi gelombang surut mendamparkan sejumlah harapan. Itu sebabnya dengan kondisi yang baru, normalitas baru yang kita hadapi, saya kira kita harus membuat perencanaan yang realistik, tanpa perencanaan yang realistik, apa yang akan kita kerjakan tidak akan menciptakan optimisme kolektif sebagai negara bangsa.

Saya kira itu, terima kasih.

Salam kebangsaan.

KETUA RAPAT:

Salam.

Terima kasih Prof. Hendrawan.

Selanjutnya Ibu Anis, silakan.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Bissmillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Anis Byarwati dari Fraksi PKS.

Pak Menteri, apresiasi dulu bahan sudah masuk hari Kamis, jadi kita sempat elaborasi cukup banyak. *Alhamdulillah*. Ada dua catatan, yang pertama tentang RPJMN dan Ibu Kota Negara ya.

Saya mulai dari RPJMN nya dulu, sesuai dengan Pak Menteri. Catatan, ini ringkas-ringkas saja karena waktunya terbatas. Target yang dicantumkan tentang pertumbuhan ekonomi sebagai apa yang disampaikan 5,7 sampai 6, ini menurut saya terlalu tinggi. Kenapa? Sejak awal periode Jokowi, pertumbuhan itu hanya mencapai 5,27% sejak awal pemerintahan Jokowi, sekarang sudah dua periode, pertumbuhan hanya mencapai 5,27%. Jadi rakyat ini kan menginginkan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan kualitas yang semakin baik, bukan seperti yang sekarang terjadi, tumbuh rendah, kualitas menurun. Rakyat akan tua sebelum kaya, karena terjebak kepada *middle income*. Untuk tumbuh tinggi tentu memiliki kapasitas yang besar, Indonesia punya kapasitas besar itu, baik dari sumber daya maupun dari sumber daya manusia. Namun itu tergantung dari kemampuan Pemerintah menggerakkan roda perekonomian sebagai pihak yang diberi mandat. Nah gebrakan-gebrakan dalam pertumbuhan sangat minim kiat lihat, karena sampai saat ini perekonomian terus bertopang kepada konsumsi rumah tangga 60% dari PDB.

Yang kedua Pak Menteri, iklim investasi Indonesia juga belum baik begitu. Hal tersebut menyebabkan Indonesia tidak mampu mengambil peluang dari perkembangan ekonomi global. Kita lihat baru-baru ini ada 33 perusahaan keluar dari Cina dan merelokasi ke negara lain. Dari 33 perusahaan itu tidak satupun perusahaan memilih Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih Vietnam, sementara 10% lainnya memilih Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia dan Thailand. Selama ini pemerintah selalu bangga dengan kapasitas pasar Indonesia yang diharapkan menjadi minat investor, faktanya faktor tersebut tidak menarik bagi investor asing, karena pasar tersebut dapat dikuasai tanpa harus mendirikan pabrik di Indonesia. Kita dikuasai tapi tidak ada pabrik di Indonesia.

Kemudian Pak Menteri, catatan untuk RPJMN juga, target IPM ini juga masih kita lihat terlalu rendah. IPM ditargetkan 75,54% pada tahun 2024, ini belum cukup. Perlu diingat, pada ABPN 2016, Pemerintah mencanangkan target IPM 75,3 walaupun pada realisasinya 70,18. Nah APBN 2019 menetapkan target IPM 71,9. Pemerintah harus lebih serius dalam mengevaluasi dalam memperbaiki kegagalan pencapaian tersebut gagal dan selain itu harus mampu memperbaiki kondisi sosial di daerah-daerah tertinggal.

Kemudian juga untuk Ibu Kota Negara. Singkat saja. Ini saja buka di *slide* 51. Pak Menteri memaparkan, alternatif sumber pendanaan IKN dan proses KPBU. Angkanya tidak ada Pak. Boleh saya tanya, berapa yang dianggarkan untuk Ibu Kota Negara. 466 ya Pak ya kalau dari media. 466 itu berapa yang dari APBN? Berapa Pak? 89. Artinya sedikit APBN, selebihnya mengandalkan KPBU. Oke. Nah kita lihat skema KPBU, ini sebetulnya sudah lama diterapkan di Indonesia, dulu disebutnya Skema Kerjasama Pemerintah Swasta, KPS dulu sudah pernah, tapi semenjak diterapkan semenjak 2005,

baru sekitar 25 triliun proyek infrastruktur yang memakai skema ini. Tingginya resiko, minimnya partisipasi swasta dan proses tender yang sulit membuat skema ini butuh waktu yang lama untuk berkembang. Nah sekarang kalau ini bergantung kepada KBPU, karena hanya 89 yang itu, berartinya selebihnya dari situ, padahal pengalaman kita membuktikan bahwa skema ini lama berkembangnya dan sejak 2005 baru 25 triliun. Sekarang anggarannya lebih dari 250 triliun dibebankan kepada KPBU. Ini bagaimana penjelasan dari Pak Menteri?

Mungkin itu saja sementara Pak Amir.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Anis.

Selanjutnya Pak Sarmuji.

Silakan Pak.

F-PG (M. SARMUJI, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Pak Menteri Bappenas yang saya hormati beserta jajaran,**

Saya pada kesempatan kali ini akan memanfaatkan waktu yang sedikit untuk berbicara tentang satu sektor yang sangat dibutuhkan, tapi sering tersisihkan, bahkan kadang-kadang ini sama sekali tidak kita pikirkan. Pada *papernya* Pak Menteri tentang Indonesia Menuju Negara Maju, itu disebutkan tentang sektor-sektor yang akan menopang, kira-kira pertumbuhan ekonomi kita untuk keluar dari *middle income trap*, yaitu mendorong industri ...(**rekaman terputus**)... pada halaman-halaman berikutnya, saya belum melihat ada satu sektor pertanian yang disinggung di dalam *paper* ini. Ada memang di dalam ekonomi berkualitas ada disebutkan akses terhadap pangan dan kualitasnya, tetapi ini tidak mesti akan memperkuat sektor pertanian kita. Karena kalau hanya disampaikan peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, ini bisa jadi ketersediaanya bukan pada memperkuat persektor pertanian, tetapi bisa saja ini bermakna sebagai untuk mengimpor produk-produk pertanian kita. Padahal kalau kita berbicara tentang pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, seharusnya sektor pertanian dan petani itu adalah sesuatu yang harus menjadi *concern* kita.

Kualitas pertumbuhan kita tanpa melibatkan sektor pertanian, pasti tidak bisa berkualitas, karena apa? Karena sektor pertanian ini masih menyerap tenaga kerja yang cukup besar, bahkan sangat besar hanya di bawah sektor industri. Kalau ini tidak kita perhatikan, maka akan ada ketimpangan kita akan semakin lama akan semakin besar. Di mana sektor jasa menyerap tenaga kerja yang sedikit bertumbuh terlalu cepat, sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja paling banyak, bertumbuh terlalu lambat.

Karena itu Pak Menteri, saya ini sekaligus kalau kita bicara tentang aspirasi dapil, ini adalah aspirasi dapil saya. Sektor pertanian dan petani harus menjadi salah satu titik tumpu kalau kita mau memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Itu satu hal pertanyaan dari saya Pak Menteri.

Yang kedua, pada periode Pak Jokowi yang pertama, Pak Jokowi kelihatannya memandang dan mungkin menjadi kesadaran kita bersama, bahwa infrastruktur adalah satu sektor yang bisa menjadi *leverage factor* pertumbuhan ekonomi. Tetapi sampai periode pertama selesai, pertumbuhan ekonomi kita hanya tumbuh biasa-biasa saja Pak Menteri, hanya tumbuh sekitar 5 koma sekian persen. Sekarang ada pergeseran, pergeserannya adalah Pak Jokowi mengutamakan pembangunan SDM, meskipun saya belum melihat sebenarnya ini, apakah orientasi pembangunan SDM itu disertai dengan disiplin anggaran dimana seharusnya anggaran terbesar itu pada pembangunan SDM. Saya juga minta penjelasan ini. Dan dalam konteks itu, apakah kita sudah menemukan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya *leverage factor* yang ada itu apa. Kalau itu kita intervensi pertumbuhan yang diharapkan oleh Pak Menteri 5,7 sampai 6,0% itu bisa tercapai. Jangan sampai kita salah menentukan *leverage factor*. Nanti kalau kita salah menentukan *leverage factor*, kita intervensi di situ, tidak bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Yang ketiga Pak Menteri, kita sering diperhadapkan kalau kita ngomong industri, kita sering diperhadapkan dengan *face a face* dunia usaha dan tenaga kerja. Ini sering menjadi problem dan sering sekali menjadi persoalan, dimana pengusaha menuntut dan meminta sebenarnya upah itu kalau boleh tidak terlalu tinggi, pekerja selalu menuntut upah itu kalau bisa selalu dinaikkan. Oleh karena itu Pak Menteri menurut saya, menurut saya dari sisi itu ada titik tengah dan itu tidak pertemuan bisa disepakati bersama. Itu apa? yaitu produktifitas tenaga kerja mesti kita tingkatkan. Kalau produktifitas tenaga kerja, saya yakin antara pengusaha dan pekerja tidak ada perdebatan. Pengusaha juga membutuhkan produktifitas tenaga kerja, pekerja juga membutuhkan produktifitasnya supaya bisa menghasilkan upah yang lebih tinggi.

Barangkali itu Pak Menteri dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sarmuji.
Pak Fauzi Amroh sudah.. tidak ada ya.
Pak Bertu silakan, Pak Bertu Merlas.

F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya tadi sempat baca-baca Pak, ada satu sektor mungkin terselip di dalam salah satu Visi Misi Pak Presiden dan saya belum melihat itu. Yaitu sektor perumahan Pak. Saya yakin Pak Menteri lebih paham dari pada saya tentang ini. Cuma ini sekedar mengingatkan saja mungkin Pak, jangan terlupakan. Jadi *backlog* sampai dengan sekarang ini kurang lebih 11,4 juta

Pak dan pertumbuhan *backlognya* itu kurang lebih juga empat ratusan ribu. Tahun 2018 ada program Pemerintah yang untuk pemberian kredit KPR itu totalnya 280 ribu, tahun 2019 kurang lebih 190 ribu, tahun 2020 152 ribu. Nah kalau turun terus begini Pak, ini kapan selesainya ini urusan ini? Sementara yang saya dengar juga, ada janji Pak Presiden bahwasanya di masa kepemimpinan dia, Beliau sampai dengan tahun 2024, dia akan menyentuh ini sebanyak 1 juta 500 rumah. Nah ini kalau 150 ribu, berarti 10 tahun lagi Pak, ini tahun 2035 ini baru selesai. Saya kira ini salah satu kebutuhan masyarakat yang harus kita perhatikan juga Pak, karena ini juga sangat menentukan dari *gini rasio* kita.

Saya kira demikian saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bertu. Ringkas, padat, jelas.

Selanjutnya Ibu Indah.

Silakan Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi XI, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran,

Saya mengucapkan terima kasih untuk pemaparan yang baik ini dan mudah-mudahan nanti seperti yang diharapkan oleh Prof. Hendrawan, seluruh rencana itu berjalan sesuai dengan realisasinya. Dan kemudian untuk menghemat dan memastikan bahwa waktu alokasi waktu 5 menit yang menjadi hak itu bisa saya gunakan dengan baik, maka saya akan membaca seluruh catatan yang saya tulis ini, agar tidak lebih dari waktu yang ditentukan.

Saya Indah Kurnia, Fraksi PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Surabaya dan Sidoarjo.

Saya bacakan garis bawahi arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang RPJMN 2020-2024. Bahwa RPJMN adalah menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju. Tidak ada Visi Misi Menteri dan semua mengacu kepada RPJMN sebagai penguatan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang paling penting adalah sinergi antara lintas Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga ada kesamaan gerak langkah. Saya juga mengapresiasi bahwa Pak Menteri tadi telah menyampaikan, baru pertama kali saya mendengar dalam ruangan ini, bahwa DPR dimasukkan dalam stakeholder dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang, berikut peran-perannya disampaikan di sini. Cuman sayangnya kemarin baru kali ini juga saya tidak diundang Pak Musrenbang di daerah saya. Kemarin dilaksanakan itu kami tidak mendapatkan undangan, biasanya kami selalu diundang.

Catatan saya untuk RPJMN 2020-2024. Pertama, pembangunan yang selama ini bertumpu kepada komoditas dan target pertumbuhan tinggi tentu berkonsekuensi pada makin berkurangnya daya dukung lingkungan hidup.

Padahal daya lingkungan hidup adalah keniscayaan bagi pembangunan yang berkelanjutan. OECD pada tahun 2019 menyusun *green growth policy review*. Terungkap bahwa laju deforestasi Indonesia masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam kurun waktu 2005-2015 Indonesia kehilangan 7% hutan atau total 1,4 juta hektar. Jika dibandingkan secara internasional, Indonesia menempati peringkat 2 setelah Brazil, sebagai negara laju deforestasi terpesat.

Deforestasi secara masif terjadi karena ekspansi kebun *agriculture*, tanaman kayu dan pertambangan, alih guna lahan dan perubahannya menyumbang separuh dari total emisi gas rumah kaca yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Menteri. Pengeringan dan pembakaran lahan gambut yang kaya karbon adalah pendorong utama emisi gas rumah kaca. Diperkirakan sekitar 9% species burung, 27% mamalia dan 3% reptil terancam punah jika deforestasi ini terus berlangsung. Dalam dokumen RPJMN 2020-2014 direncanakan target deforestasi turun sedikit posisi dari tahun 2018, sebesar 24,9%. Ditargetkan deforestasi pada posisi 24,4% dengan menjaga tutupan lahan gambut dan hasil rehabilitasi seluas 2 juta. Lalu bagaimana Pak dengan potensi alih fungsi lahan hutan yang terus ekspansif terutama untuk sawit, pulp dan tambang? RPJMN 2020 belum mengembangkan suatu metode pengukuran yang terintegratif dengan membuat neraca pembangunan semisal setiap sekian persen pertumbuhan ekonomi akan berkonsekuensi sekian persen pada penurunan indeks lingkungan hidup. Ini dari masukan dari kawan-kawan yang pegiat lingkungan hidup.

Terus kemudian poin berikutnya, ekspor Indonesia masuk bertumpuk kepada komoditas, tidak beranjak ke sektor-sektor yang lebih *hitech*. Jadi pola ekspor kita tidak ada bedanya di era 80-an. Bahkan yang lebih stragis rasio ekspor terhadap PDB terus menurun, misalnya tahun 2000 rasio ekspor terhadap PDB sebesar 41%, tahun 2018 hanya 21% itu masih jauh di bawah Thailand yang 69%.

RPJMN memberikan penjelasan mengenai strategi ekspor dengan diversifikasi ekspor dengan diversifikasi produk dan negara tujuan termasuk revitalisasi industri diberbagai bidang. Namun jika melihat target rasio ekspor yang hendak dicapai 2024 sebesar 3% terhadap PDB, saya pikir itu adalah indikator yang berbeda yang digunakan dalam dokumen RPJMN yang ini.

Kemudian penetrasi teknologi informasi, terutama teknologi digital dan *artificial intelligence*, telah mengubah pola perdagangan dan jasa. Dampaknya sangat mengurangi tenaga kerja yang selama ini dipekerjakan oleh manusia. Para analis memproyeksikan, sebesar 60% pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia akan digantikan oleh mesin, ini akan menjadi PR besar kita bersama. Sehingga ada terotomatisasi dan tergitalisasi. Kenyataan ini semakin tidak *compatible* dengan struktur tenaga kita yang 72% adalah lulusan SD dan SMP Pak. Itu mungkin bisa benar-benar menjadi PR kita bersama. Sehingga 72% itu tidak terserap di sektor formal, tidak terkait juga dengan industri 4.0 Pak, mereka ini terpinggirkan. Saat ini ritel sudah dikalahkan dengan *bisnis e-commerce* seperti itu. Jadi sudah mulai tampak ke depan ini PR besar kita adalah struktur tenaga kerja kita yang mayoritas didominasi oleh lulusan SD dan SMP.

Sementara di lain pihak, tingkat pengangguran kita turun sangat pelan ya landai, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,8% di tahun 2019. 2015, 6,18%. 2024 sesuai target tingkat pengangguran terbuka 3,6 sampai 4,3%. Nah

kalau kita bicara tentang program vokasi Pak, itu tentunya memikirkan masa depan, ke depannya program vokasi itu bisa diterapkan. Tetapi PR yang kita saat ini yang di depan mata kita ada 72,8% lulusan SD, SMP itu yang harus kita pikirkan bersama. Jika mencermati RPJMN, belum mendapatkan gambaran yang utuh terkait upaya transformasi peningkatan *skill* tenaga kerja kita dalam menghadapi era digitalisasi dan teknologi informasi ini.

Kemudian itu, waktu saya tinggal berapa Pak Amir.

KETUA RAPAT:

Sudah masuk 5 menit Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Sudah. Baik.
PR saja Pak.

Terakhir, yaitu tentang tingkat kemiskinan yang ada di daerah Papua. Karena meskipun sudah ada OTSUS, tetapi saat ini tentu kita melihat di paparan, di data saya kemiskinan Papua masih tinggi Pak, 26,34%, konflik sosial juga mudah meledak di daerah ini. Nah berapa target penurunan kemiskinan dan pengangguran di kawasan ini dibuat oleh Bappenas?

Pimpinan, terima kasih untuk waktu yang diberikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Indah.
Selanjutnya, saya persilakan Pak Misbakhun. Pokoknya waktu 5 menit.
Silakan.

F-PG (MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan yang saya hormati,
Pimpinan Komisi XI,
Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran yang saya hormati.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama saya memberikan sebuah apresiasi yang tinggi Pak. Ini kita menerima bahan ini bisa kita baca diakhir pekan Pak, sehingga sangat kalau saya kemudian mengatakan bahwa RPJMN ini bisa saya pelajari secara dalam dan detail Pak.

Untuk itu saya berharap Pak, ini bisa digunakan dengan baik, visi besarnya Presiden ini bisa berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik oleh semua Kementerian Pak, jangan sampai ada Menteri nanti sakit perut gara-gara mewujudkan visi-misi besarnya Presiden Pak. Ini yang ingin saya pastikan Pak. Jangan sampai kemudian ada Menteri yang sakit perut gara-gara

mewujudkan RPJMN yang Presiden. Ini yang tidak boleh Pak. Karena apa? Bagaimanapun juga RPJMN ini adalah sebuah kebijakan yang di mana sebuah visi-misinya Presiden, didetailkan dalam sebuah rencana jangka menengah yang eksekutabel yang bisa dieksekusi dan *reachable*, bisa dicapai, sehingga, kan ini ilmunya dari Bapak ini, kita semua di sini belajarnya dari Bapak. Sehingga apa yang menjadi *planning paper* ini rencana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik.

Dan tentunya Pak, ini butuh visi besar. Saya yakin dengan kemampuan Pak Menteri mengkonsolidasikan semua kekuatan dengan segala pemahaman yang luar biasa, saya lihat luar biasa ini percaya dirinya Bappenas hari ini, jasanya rapi begitukan dan kemudian tadi dimulai dengan rapat yang sangat bagus dan mudah-mudahan ini ke depan bisa berjalan dengan terus.

Kemudian yang ingin saya kuatkan mengenai IKN Pak, Ibu Kota Negara yang baru. Visi Presiden ini kalau menurut saya, tinggal kita kawal dengan baik, sangat sedikit kita menemukan pemimpin punya visi yang berani kemudian mengeksekusi Pak. Banyak pemimpin yang mencita-citakan, membangun infrastruktur, mewacanakan infrastruktur, tapi kemudian begitu mengeksekusi, dia kehilangan keberaniannya. Pak Jokowi ini Pak, infrastruktur dieksekusi, Ibu Kota Negara dieksekusi. Nah inilah kelebihan yang harus kita kawal dan saya yakin tidak banyak pembantu yang bisa memahami pembantunya Presiden, yang bisa memahami keinginan ini Pak, dan tidak sakit perut Pak pada saat mengeksekusi.

Kita sering bertemu Pak di sini diruangan, orang berbicara sangat akademik, begitu kita janji janji politiknya, sakit perut Pak. Nah inilah yang menurut saya harus kita yakinkan bahwa Pak Jokowi ini mewariskan memberikan kepada kita *legacy* yang bersifat jangka panjang dan dikenang.

IKN ini Pak, Ibu Kota baru ini, kalau saya berharap ini akan menjadi senter dari sebuah pusat peradaban kita ke depan yang bisa perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita perhatikan contoh Washington DC Pak, pusat pemerintahan dimana, *balance off powernya* gimana, ketemu antara *white house* dengan Capital, kemudian mereka *capture* berikutnya itu adalah pusat peradaban yang lain setelah pemerintahan yaitu pengetahuan, dimana pinggir-pinggirnya itu adalah perpustakaan dan universitas. Kemudian berikutnya itu adalah mereka memberikan setelah pusat kekuasaan, pusat pemikiran, berikutnya kita diberikan kepada apa, makam-makam, di sana ada *memorial Jefferson*, tidak jauh kemudian di Vrigina kita temukan makamnya Kennedy dan sebagainya, untuk sebuah perjalanan peradaban.

Nah saya yakin dengan kemampuan para perencana yang baik, dengan eksekusi yang baik, bahwa ini akan menjadi sebuah peradaban baru bagi bangsa kita ke depan. Nah inilah kalau menurut saya tinggal bagaimana kemudian *melandingkan* ini menjadi sebuah keputusan politik yang bisa dilaksanakan dengan baik. Saya tidak meragukan sedikitpun kemampuan Bapak untuk itu. Untuk itu saya ingin Pak, inginnya keinginan kita, itu adalah kemudian komunikasi yang berkesinambungan disajikan kepada masyarakat. Karena apa? (suara tidak jelas) jarak komunikasi ini sering menjadi pengganggu. Karena apa? Program yang begitu bagus, orang kemudian berbicaranya apa, anggaran yang terbatas dan sebagainya. Coba kalau kita berbicara soal anggaran, ya memang kita ada keterbatasan, tapi bagaimana kemudian kita mengatur strateginya itu, diantara keterbatasan itu, tapi kita bisa melaksanakan dengan baik. Empat ratus.. berapa ratus triliun yang kita

belanjakan hari ini, itu akan menjadi sangat sedikit kalau kita berbicara tentang masa depan, yang bisa kita raih dengan apa yang kita *spending* hari ini. Karena apa? Bagaimanapun juga pengorbanan ini harus kita ambil. Kalau kita tidak berani mengambil mengeksekusi keputusan yang penting ini, maka yang ada adalah kontroversi, jembatan kontroversi ini adalah komunikasi yang baik. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang besar yang tidak didadar oleh sebuah kontroversi oleh sebuah keputusan, tapi kemampuan kita adalah mengeksekusi dan menjembatani dengan komunikasi dengan baik, itu akan menjadi pemersatu atau apa yang menjadi kontroversi itu bisa dijelaskan dengan baik.

Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya kira ini pertama kalinya kita bisa batasi waktunya Pak Misbakhun bicara. Sampai Pak Hatari mengatakan, luar biasa Pak Misbakhun hari ini.

Silakan Pak Kamrussamad. Pak Kamru silakan.

F-P. GERINDRA (KAMRUSSAMAD):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, Menteri dan seluruh jajaran yang kami banggakan,

Saya Kamrussamad dari Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Pertama-tama, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Bappenas yang telah menyusun rencana ini. RPJMN ini bagi kita sangat penting sebagai pedoman. Karena itu ijinlah saya menyampaikan beberapa pandangan mengenai data yang disajikan. Yang pertama, belum tergambar secara jelas tentang penjabaran secara sektoral terhadap program pembangunan prioritas nasional kita. Misalnya secara sektoral di bidang konsep ketahanan pangan nasional kita untuk 4 tahun ke depan, konsep ketahanan energi kita untuk 4 ke depan, lalu kemudian implementasi dari pada 5 program Presiden yang disampaikan dalam 20 Oktober saat pelantikan Beliau mengenai SDM yang unggul juga belum terjabarkan secara sektoral lebih mendalam. Sementara dihilirnya, beberapa kebijakan ditingkat kementerian, itu tengah berjalan. Misalnya di SDM menyangkut reformasi birokrasi dari penjabat struktural menjadi pejabat fungsional, seperti di kantor Bapak juga yang sedang memulai dengan Smart Office misalnya. Nah ini perlu ada strategi nasional. Karena apa? Karena khawatir nanti khususnya misalnya masalah Pegawai Negeri Sipil, akan terjadi ledakan besar di akhir, jika kita tidak memiliki strategi jangka menengah. Kita bisa bayangkan, pelamar, Pak Menteri, pelamar CPNS tahun ini itu 4,1 juta. Baru seleksi administrasi sudah gugur 800 ribu, hanya 3,2 juta, sementara kuota yang mau diterima tahun ini hanya 150 ribu. Masalahnya di mana? Adalah begitu besar putra-putri kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ini yang perlu ada strategi penyusunan

bagaimana kita menghadapi ledakan-ledakan angkatan usia produktif di hari-hari mendatang.

Yang kedua, kita masih ingat RPJM 2015-2019, waktu itu ada kesulitan untuk mengeksekusi mengimplementasi, karena terlalu rumit. Karena itu mungkin perlu ada penjabaran lebih rinci lagi yang tadi dijabarkan secara pulau-pulau ke pendekatan pembangunan ke wilayah berbasis kepulauan, lebih regional lagi berdasarkan potensi ekonomi lokal. Sehingga nanti bukan diparuh waktu kita baru berjalan kita sudah melakukan perubahan arah terhadap perubahan kebijakan pembangunan nasional kita, karena ada penyesuaian yang terjadi di lapangan.

Yang kedua, ada banyak daerah yang juga menginginkan ada Daerah Otonomi Baru DOB, menginginkan adanya pencabutan moratorium. Nah apakah dalam rencana pembangunan RPJM ini untuk 4 tahun ke depan, kita menempatkan ini bagian dari pada strategi pembangunan atau bagian dari pada sekedar aspirasi yang kita terima dari daerah? Ini saya kira perlu dimasukkan sebagai langkah antisipasi kita menjawab aspirasi jika kita belum mencabut moratorium. Tapi jika kita bagian dari pada ingin membuat daerah otonomi baru, maka kita sudah punya perencanaan yang jauh lebih matang.

Yang ketiga, kami juga melihat perlunya ada penguatan strategi di bidang *entrepreneurship*. Kenapa? Karena ini yang bisa membantu pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan angkatan kerja. Nah ini perlu dilakukan. Kalau semua kita mengadakan pembangunan bersumber dari APBN bukan dari *private* sektor, maka saya kira kita agak sulit untuk mencapai target yang optimis ini. Kalau Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa 2045 kita berada pada lima ekonomi dunia, maka kita harus terjemahkan bahwa 5 tahun pertama dari perjalanan 25 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia merdeka, Beliau ingin memimpin langsung supaya *road map* pembangunan nasional kita itu betul-betul bisa kita capai pada titik yang beliau harapkan itu 2045.

Saya kira itu Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan.

Terakhir sekali mengenai data *stunting* yang Bapak Menteri sampaikan, di halaman 28. Lokus fokusnya dari tahun ke tahun kok semakin melebar, yang tadinya tahun 2020, 260 kabupaten, malah 2021 naik dari 360, 2024 dari semua *discover* 514, penjelasannya seperti apa? Apakah artinya bahwa *stunting* itu tidak bisa diatasi, sehingga semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus terlibat, atau justru secara teritorial semakin kita persempit. Mohon penjelasan untuk *paper* tentang ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kamru.

Silakan Ibu Wartiah.

Selanjutnya Ibu Puteri ya, Adinda.

F-PPP (Drs. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Yang kami hormati Bapak Menteri PPN dan Kapala Bappenas beserta jajarannya,

Saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini, karena penyiapan materinya jauh-jauh hari sudah diserahkan kepada Komisi XI.

Kemudian yang kedua, kami berterima kasih juga bahwa apa yang kita dengarkan pada diskusi saat ini adalah mempertajam apa yang menjadi cita-cita Presiden RI, dimana cita-cita untuk Ibu Kota baru ini, di zaman Pak SBY, tetapi direalisasikan jamannya Presiden Jokowi. Ini yang luar biasa.

Bapak-Ibu sekalian.

Saya termasuk yang sangat optimis, bahwa apa yang dipaparkan ke depan akan bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena fakta hari ini separuh penduduk Indonesia adalah atau terkonsentrasi di Jawa, sedangkan kewilayahannya tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, bahkan luas Pulau Papua saja lebih luas dari Pulau Jawa. Ini juga faktornya.

Kemudian yang kedua, saya termasuk pendatang baru di sini, tetapi saya tinggal beberapa bulan di Jakarta ini, sangat terasa bahwa memang macetnya tidak bisa ditolerir, kemudian apa lagi banjir hari ini. Saya kira publik juga harus diberitahu, bahwa fakta-fakta inilah yang membuat mungkin Presiden kita sangat prihatin, sehingga ke depannya akan membuat terobosan baru, yaitu dengan adanya rencana Ibu Kota baru yang akan pindah.

Kemudian yang lain-lain, saya melihat tipikal Presiden kita ini orang yang berpikir *out of the box*, selalu tidak seperti biasanya, tetapi terjadi, berani menerobos. Ditunjang oleh Bapak Menteri kita yang luar biasa, saya kira ini akan sangat menyambung. Belum pernah saya melihat Pak Misbakhun hari ini begitu luar biasa, bicaranya elegan, luar biasa dan saya tidak tahu ada hubungan apa Pak Misbakhun dengan Pak Menteri ini, luar biasanya. Biasanya mitra kerjanya kita yang lain itu dibuat sakit perut, kadang-kadang pusing sendiri cari jawabannya, tetapi ini luar biasa, saya sangat bangga. Karena biasanya kalau Beliau ngomong itu, agak objektif. Nah objektifitas itulah yang saya ingin apresiasi hari ini Pak Misbakhun.

Kemudian pada kesempatan hari ini, karena waktunya terbatas, saya langsung saja Bapak Menteri, walaupun kita sangat optimis, tetapi ada hal-hal yang perlu diantisipasi, seperti isu tentang pembinaan ASN yang sebagian besar saya membaca sosial media akan ada penolakan-penolakan. Saya kira ini perlu diantisipasi. Mungkin kaitannya ASN dengan kesiapan infrastruktur yang harus dipersiapkan. Karena saya tahu sebagian besar ASN yang saya lihat di Kota Jakarta ini, dia tinggal di Apartemen yang murah atau yang terjangkau, sehingga tidak merugikan bulannya begitu ya atau gajinya. Ini juga perlu ada pemikiran ke depan untuk dipersiapkan infrastruktur penunjangnya.

Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa mendorong ekonomi kreatif yang disampaikan oleh Bapak Menteri dalam paparannya itu sangat luar biasa. Karena itu ke depan perlu ada terobosan-terobosan baru dan sosialisasi yang lebih paripurna lagi agar ke depan SDM nya perlu dipersiapkan juga untuk mendorong ekonomi kreatif tersebut.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan hutan, tentu ini juga menjadi pemikiran kita bersama-sama, jangan sampai ada hutan tergerus, itu diantisipasi supaya hutan lindung kita terjaga dengan adanya pemindahan Ibu Kota baru.

Dan yang terakhir, saya kira sektor pariwisata Bapak Menteri, ini juga menjadi pemikiran kita bersama-sama, mendapatkan porsinya di tempat nanti Ibu Kota Negara yang baru itu.

Saya kira ini saja dari saya dan saya ucapkan selamat kepada dua orang staf yang baru ini, Mbak Kartika Yudisti yang luar biasa saya tahu ini orang hebat ini, yang lain saya tidak tahu namanya, tapi saya ucapkan selamat pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa bekerja sama yang baik.

Sekali lagi kalau ada ha-hal yang kurang berkenan, kurang lebih mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terakhir dari sebelah kiri, Adinda Puteri.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN):

Namanya Puteri, bukan Adinda, izin.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri beserta jajaran yang terhormat, Anggota Komisi XI, Pimpinan, mohon ijin.

Karena saya terakhir, jadi saya akan *straight to the point* saja beberapa yang ingin konfirmasi.

Sebelumnya perkenalkan nama saya Puteri Komarudin. Gak pake Adinda sebenarnya, Puteri aja ...(**rekaman terputus**).. Pimpinan-pimpinan di sinilah semuanya.

Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama terkait dengan pembiayaan. Dari yang saya lihat pada *handout* paparan ini belum menjelaskan terkait dengan kaidah pelaksanaan yang terdiri atas kerangka regulasi dan kerangka pembiayaan untuk RPJMN kita. Yang ingin saya tanyakan, berapa perkiraan total kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan selama 5 tahun ke depan dan terkait dengan itu karena kita bermitra juga dengan Kementerian Keuangan, dari Bappenas sendiri bagaimana strategi pembiayaan yang dapat dilakukan? Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan kebijakan pusat-pusat pertumbuhan. Jadi untuk mendorong pemerataan pembangunan pemerintah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, destinasi, pariwisata prioritas di luar Pulau Jawa. Dengan tujuan agar memberikan *multiplier effect* bagi wilayah sekitarnya. Dalam rentang waktu 2015-2019 kemarin itu kalau tidak salah pemerintah telah menetapkan 15 KEK, 14 KI dan 10 DPP. Dan dengan komitmen untuk *multiplier effect* itu sebenarnya

terdapat juga pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Jawa, seperti KEK Singasari di Kabupaten Malang dan KEK Kendal di Kabupaten Kendal pada tahun 2019, dimana sebenarnya seperti yang kita tahu Pulau Jawa itu telah memiliki *competitive advantages* dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jadi sebagai *think tank* perencanaan, sejauh apa kajian teknokratik yang telah dilakukan Bappenas bersama Kementerian lembaga terkait, terkait dengan kebijakan KEK tersebut dan sejauh apa dampak pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan selama ini?, mengingat peran prestasi pemerintah cukup besar terutama pembangunan infrastruktur pendukung di daerah-daerah tersebut. Dan bagaimana arah kebijakan ke depan dari pengembangan pusat pertumbuhan ini, mengingat efektivitasnya juga perlu kita ukur. Itu yang kedua.

Yang ketiga, terkait dengan Musrenbang, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah RKP 2021. Hasil rapat kami bersama Kementerian Keuangan mengatakan, bahwa pada tahun 2019 masih banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang, namun alokasi untuk belanja produktif itu cenderung berkurang. Sementara pada Agustus 2019, Pak Suharso sebelumnya telah menjelaskan bahwa kualitas belanja negara masih perlu ditingkatkan, baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah, karena pengalokasiannya masih tepat sasaran guna memberikan dampak maksimal bagi ekonomi Indonesia. Jadi pertanyaan kami, bagaimana strategi Pak Suharso beserta Kementerian Bappenas untuk pelaksanaan Musrenbang ini dapat berjalan efektif, sehingga penganggaran dapat sinkron dengan target prioritas pembangunan? Dan saya juga ingin menanyakan, apa agenda prioritas pemerintah pada RKP Tahun 2021?

Dan yang terakhir terkait dengan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wartiah juga terkait dengan pemindahan ASN. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja alternatif skenario yang diterapkan dan berapa perkiraan besaran anggarannya, karena yang kita tahu selain kita-kita juga akan pindah, *insya Allah* terpilih lagi ya Pak, 2024 ASN juga akan pindah ke sana. Jadi yang ingin kita tahu kira-kira berapa besarnya yang akan dibutuhkan. Dan juga kapan sistem pemerintahan daerah ini akan terbentuk, karena saya baca di lampiran ada namanya Badan Otorita dan bagaimana mekanisme pembagian kewenangan antara Gubernur dengan Manajer kota yang sekarang sudah dipersiapkan. Dan apakah hanya dibatasi dari luasan kawasan saja dan bagaimana hubungan kerja antar aktor tersebut, karena saya sudah mulai dilihat sama Pak Ketua, jadi kiranya sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bagus sekali ini Dik Puteri.

Terakhir sebelah kanan Pak Agung Rai.

Silakan Pak.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi yang saya hormati,
Pak Suharso beserta jajaran yang saya hormati,**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
*Om Swastiastu, Namó Budhaya,
Shalom.*

Saya Gusti Agung Rai Wirajaya, sahabat Bapak yang sejak yang dulu Bapak di DPR. (suara tidak jelas) ini yang saya mau sebut, karena kalau saya melihat di ruangan ini kita sama-sama satu tim, ya Pak Ketua?

Artinya begini Pak Ketua, Pak Menteri, karena tadi ada yang menyinggung masih masalah lalu yang diungkit-ungkit, sebenarnya kita tidak perlu melihat masa lalu lagi. Karena sekarang kita akan melihat ke depan, kalau tidak kita akan tertinggal. Seperti apa yang disampaikan salah satu anggota Bapak ini, *out of the box*, ya Bu ya. Inilah yang perlu kita cari pemimpin yang bisa *out the box*. Kalau kita mencari populis saja, barangkali sudah selesai, sudah bisa kita selesaikan, sudah cukuplah apa yang populis-populis yang kita lakukan. Namun bagaimana mewujudkan sebuah cita-cita itu harus mempunyai keberanian dan kitapun punya tekad, kalau sudah siap segala sesuatunya, tentunya kita harus bisa laksanakan.

Dan tentunya apa program-program yang tadi ada kekurangan, bisa segera terpenuhi, bisa dilengkapi terkait dengan kesehatan, pendidikan yang berlandaskan dengan Pancasila. Yang perlu kita tetap sebagai landasan dasar, kalau tidak nanti di zaman digital ini, di era digital ini, Pancasila yang sudah di perjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita terdahulu, jangan sampai sirna secara perlahan-lahan dan ini pun tetap harus kita tetap pertahankan, karena sebagai dasar negara kita.

Dan kemudian masalah anggaran, saya kira sudah pemerintah sudah menyiapkan, namun bagaimana membuat itu seminimal mungkin namun menghasilkan sebuah Ibu Kota baru yang akan menjadi perhatian dunia, seperti yang dikonsepsikan oleh Pak Menteri itu sendiri. Saya dalam hal ini sepakat apa yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa kita punya tekad untuk membangun sebuah Ibu Kota baru, agar menuju harapan baru di kemudian hari. Memang kalau sekarang banyak yang pesimis, tapi kalau sudah terwujud, optimis itu akan pasti terlaksana. Apa lagi kita melihat jumlah penduduk yang di Jawa maupun yang di luar Jawa termasuk Bali itu kan tidak sebanding dengan jumlah yang ada di Jawa ini, kalau tidak kita kurangi sedikit-sedikit pindahkan, ini Jawa bisa tenggelam. Bisa-bisa ke tarik Bali juga bisa tenggelam, karena banyaknya mulai pariwisata sudah banyak yang mulai hijrah ke Bali.

Saya kira itu saja Pak Menteri, tidak ada pertanyaan, cuma sebuah saran dan saya kembalikan kepada Bapak Wakil Ketua Umum, eh salah.. Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Agung Rai.

Ya kalau teman begitu cara mendorongnya.

Selanjutnya ke meja Pimpinan, silakan Pak Hatari, senior kita. Pak Hatari sudah bilang kalau pendapat, pimpinan lebih kecil, lebih sedikit.

WAKIL KETUA KOMISI XI (Dr. ACHMAD HATARI SE., M.Si./F-P. NASDEM):

Yang pertama, saya salut tadi.

Pak Menteri hari ini era baru, formula baru di dalam ruangan ini, karena Pak Menteri hadir hari ini, bagus dan mudah-mudahan ini akan seterusnya. Tiga menit ketok, nanti sesi kedua lagi silakan. Jadi saya luar biasa.

Pimpinan, yang pertama Pak Menteri, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Deputy Bapak, saya Achmad Hatari dari Fraksi Partai Nasdem, Dapil Maluku Utara. Kenapa saya tidak kepada Pak Menteri, Beliau ini yang juga ikut membesarkan saja. Saya punya guru besar sejak tahun 1993 Pak, hampir saya bisa masuk ke tempat ini dan terawat hubungan itu sampai dengan hari ini. *Haqqul Yakin* Pak, bahwa Pak Menteri akan bisa melakukan perubahan secara terukur. Yang pertama Pak Menteri harus *meminimize* ketimpangan pembangunan antar wilayah, sehingga tidak ada lagi kawasan tertentu yang meminta memisahkan diri Negara Republik Indonesia.

Kemudian terkait dengan Musrenbang, ini Bapak-bapak para Deputy. Perlu dipertegas supaya Anggota Komisi XI yang di dapil itu diikutsertakan, jangan maju mundur. Kalau surat itu disampaikan kepada kita teman-teman Anggota Komisi XI, satu hari menjelang pelaksanaan Musrenbang, siapa mau bisa hadir Pak? Jadi ini tolong menjadi perhatian. Yang berikut Pak Menteri, tolong juga Pak Menteri mengeluarkan satu aturan baru bahwa yang menjadi Ketua Bappeda di Kabupaten-Provinsi, jangan kepala daerah menunjukkan seorang penjaga sekolah malam menjadi Ketua Bappeda. Kapan terjadi akselerasi pembangunan? Kok ini kita bersuara di sini terus-terus, kesepakatan di sini sampai di Bappenas hilang. Maaf Pak, saya sudah tahun yang keenam ini, Komisi XI dan di Badan Anggaran. Jadi tolong Pak, kalau komitmen itu mahal loh Pak. Jangan kita komitmen di sini, di tengah jalan menuju jalan ke Ponogoro hilang ditengah jalan. Dan ini terjadi para Deputy. Apalagi Musrenbang itu hanya berlaku kurang lebih satu jam. Jadi *assalamu'alaikum*, kemudian ditutup dengan *wa'alaikumsalam*, selesai. Yang penting DIPA, yang ada komponen alokasi untuk Musrenbang bisa dipertanggungjawabkan, selesai, *outputnya* seperti apa, *Wallahu a'lam* Pak.

Ini Pak ini yang terjadi, karena itu tadi saya *haqqul yakin*, Pak Menteri bisa melakukan perubahan secara terukur terkait dengan hal-hal seperti ini. Jadi jangan Musrenbang itu hanya bersifat seremoni yang *outputnya* kabur. Ini yang menjadi itu. Ini mana kesepakatan kemudian hilang.

Kemudian Pak Menteri, ini arahan Bapak Presiden. Saya baca di sini, semua rancangan-rancangan betul-betul tersambung dengan penganggaran juga termasuk dengan Kementerian secara baik. Pengalaman menunjukkan sebelum Bapak menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tadi sepintas saja saya bacanya, tidak korelasi sama sekali. Sekal lagi bisa diuji nanti. Saya baca di sini Pak. Penyusunan anggaran belanja Kementerian Lembaga belum sepenuhnya memenuhi proses yang *prudent*.

Satu, mekanisme perhitungan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebutuhan belanja Kementerian Lembaga, semakin tidak jelas dan tidak memadai.

Pak saya di Banggar dan di tempat ini tahun keenam, jadi selalu melihat-melihat ini. Apa lagi Pak Menteri tahu, saya sudah kurang apa lagi, 40 tahun mengurus-urus barang ini dan beliau mengikuti secara persis.

Yang kedua, Adanya alokasi belanja Kementerian Lembaga yang belum jelas sasaran *outputnya* keluarannya, kabur, baik pada tahap pengajuan RAPBN oleh Pemerintah maupun pada saat pembahasan dengan DPR.

Yang ketiga, belum seluruhnya sasaran di dalam RKP dijabarkan secara jelas dalam sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Ini para Deputi ini menjadi catatan penting loh Pak.

Yang keempat, belum ada mekanisme untuk menjamin kesesuaian. Banyak bicara dalam *paper* ini tentang kesesuaian. Belum adanya mekanisme untuk menjamin kesesuaian sasaran program dan kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga dengan sasaran yang ditetapkan di dalam RKP. Ini Pak, tidak bisa dibantah Pak, valid.

Dampak dari hal-hal ini semakin menjadi tidak jelas kontribusi anggaran belanja Kementerian Lembaga terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam RKP dan tidak terserapnya anggaran belanja Kementerian Lembaga karena tidak sesuai dengan kemampuan daya serap Kementerian Lembaga, apa lagi penganggaran tidak berbasis kinerja sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003. Tadi ada teman-teman juga mempersoalkan, soal pendidikan dan kesehatan, betul loh Pak. *Mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan pemerintah pusat semakin tidak jelas program kegiatan, apa lagi *output* dan *impactnya*. Tolong ini Pak, tapi sekali lagi, yakin Pak mudah-mudahan ada terobosan Bapak-bapak yang sudah lama di kantor sana Pak dan saya berulang lagi kepada Bapak Deputi. Zamannya Pak Saleh Affif menjadi Menteri Bappenas, saya selalu masuk-keluar itu kantor dan selalu mengikuti Saleh Affif di pegunungan Papua dengan Pesawat Misonaris. Jadi saya paham betul ruangan-ruangan di kantor Bapak-Bapak di sana. Tolong ini Pak diperbaiki. Mudah-mudahan yakin baik.

Jadi Pak Rakorbangda harus terus *diprotect* dan diadvokasi oleh Bappenas, tidak akan sulit lho Pak. Hasil Rakorbang, Musrenbang bisa dipatahkan oleh kepala daerah, karena dia punya diskresi sebagai kepala pemerintahan dia memiliki kewenangan untuk merubah itu. Tidak bisa Ketua Bappenas tidak bisa membantah Bupati, oh ini geser saja, ini geser saja.

Yang terakhir dari saya Pak Menteri, Pimpinan rapat minta maaf, satu menit saja, tidak terlalu jauh melebihi dengan itu Pak. Yang terakhir terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Ini menjadi diskusi yang selalu mengemuka. Dari dimensi-dimensi perencanaan pembangunan, apakah soal yang satu ini penting dan mendesak ketika kondisi pemenuhan kita masih dihantam badai, atau soal yang satu ini penting, tetapi belum mendesak? Ini menjadi pertanyaan. Saya sudah pernah berdiskusi dengan Pak Menteri, alokasikan waktu untuk bersama para Deputi, ditemani lagi Anggota Komisi XI di dapilnya untuk menjelaskan soal ini Pak, termasuk skema pembiayaan yang.. dan apakah ini penting dan mendesak, masih jutaan rakyat Indonesai yang miskin, melarat tertinggal, termiskin, terluar.

Terima kasih banyak.

Atas nama pribadi Pak Menteri, rasa hormat Bapak bisa hadir pada hari ini, kami senang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terakhir dari Meja Pimpinan, Pak Eriko, silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XI (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S./F-PDIP):

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan Pimpinan seluruh anggota Komisi XI yang saya hormati,
Pak Menteri PPN, Kepala Bappenas yang saya hormati beserta seluruh
jajaran hadir,**

Saya Eriko Sotarduga, dari Fraksi PDIP, kalau Kantor Ibu-Bapak, pasti di dapil saya, di Jakarta Pusat, kalau tempat tinggal Ibu-Bapak, belum tentu di Jakarta Pusat, Selatan dan luar negeri, tetapi tidak ada salahnya ya Pak Menteri, sudah berkantor di situ, di tempat di situ kan tidak ada salahnya memilih salah satu pimpinan yang dapilnya di sana, ini bukan kampanye bukan, tapi masih 4 tahun lagi kan tidak ada salahnya. Sama seperti Ibu Kota 4 tahun lagi baru pindah, tapi direncanakan dari sekarang dengan matang. Begitu Ibu-Bapak ya. Nah tidak salah ini menitip, ini kan pasti kenal Eriko Sotarduga, bukan.. ini lahirnya karena memang tak terduga Pak Menteri.

Jadi kalau kami sebenarnya secara pribadi Pak Menteri melihat sendiri bagaimana Pak Menteri ini mengurus cucu saja sudah bagus, mantab, *perfect*, apalagi mengurus hal seperti ini. Ini tidak kita ragukan lagi dan Bapak memilih Pak Amir di sini sudah pas betul Pak, nanti kalau boleh nitip, beliau penerus Bapaklah yang ke depannya, tidak salah beliau ini wakil ketua umum, kami pun merasa tentram di sini semua, boleh ditanyakan satu persatu seperti. Dan baru kali ini namanya Pak Amir ini, wah betul-betul agresif Pak, biasanya sabarnya tidak ketulungan. Kalau kali ini memang cukup keras, cekatan dan juga memang disiplin.

KETUA RAPAT:

Waktunya tinggal dua menit Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XI (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S./F-PDIP):

Oh tinggal 2 menit ya, wah bahaya ini, berarti belum sempat masuk ini Pak.

Baik, saya sebenarnya ingin menyampaikan ini Pak, mewakili sebenarnya Pak Sihar pengusaha Kelapa Sawit, begitu juga dengan banyak teman-teman di sini termasuk Pak Misbakhun. Ada tiga hal barangkali Pak Menteri, bukan karena saya bukan dari PDIP Nomor tiga, bukan begitu, tapi memang pertama, saya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di sini. Kalimantan Timur ini saya paham betul Pak, kalau nanti

Bapak, Ibu di Bappenas juga mengundang silakan, saya memahami betul adat-istiadatnya, saya memahami betul. Tidak salah Bapak Presiden, Bappenas memilih Kalimantan Timur. Ini daerah yang sangat *welcome* terhadap pendatang, yang namanya Balikpapan kita kenal dari jaman dahulu kala, memang kota yang dipenuhi oleh investasi-investasi dan memang kulturnya juga sangat *welcome* dengan masyarakat luar. Jadi tidak salah memilih tempat yang begitu indah sebenarnya di teluk Balikpapan ini. Hanya saja, cuma Pak Menteri dan seluruh jajaran, alangkah sayangnya Pak, kalau hanya memanfaatkan ini hanya sekedar menjadi Ibu Kota, potensinya luar biasa.

Pak, ini masuk di alkie dua, alur laut, Pak Menteri sudah sangat paham hal ini. Ini pelabuhan yang tidak perlu didalamkan, dalam dengan sendirinya, penghasil Kelapa Sawit mungkin nanti nomor dua, nomor tiga terbesar di Republik Indonesia. Ada hampir 100 pabrik Kelapa Sawit nanti potensi kurang lebih 7-10 juta ton minyak Kelapa Sawit keluar dari sana. Dari atas keluar minyak kelapa sawit, dari bawah keluar minyak bumi dan juga gas. Ini luar biasa tempat ini. Sayang Pak Menteri, kalau hanya dimanfaatkan hanya sekedar menjadi Ibu Kota saja. Apa lagi kalau yang kami lihat diambil lokasinya luas lahannya itu cukup besar. Di situ juga ada Kawasan Industri Kariangau, ada Pelabuhan Kariangau, ada Pelabuhan Semayang, ada Kawasan Ekonomi khusus Maloi. Nah alangkah baiknya Pak Menteri dan seluruh jajaran Bappenas, ini dikomprehensifkan semua. Termasuk juga nanti Ibu Bapak jangan salah, nanti Selat Malaka akan sepi, kenapa? Karena nanti Thailand akan membuat yang namanya Kra, yang namanya Terusan Kra yang akan memotong. Ibu-Bapak dari mana lagi kita punya kesempatan. Nah kesempatannya adalah alki dua ini, saya sekali kalau kita tidak memanfaatkan. Maksud saya, jangan hanya sekedar Ibu Kota, tetapi juga mengkomprehensifkan alur laut di alki dua ini beserta seluruh Provinsi-provinsi yang ada di sana. Ini barangkali satu masukan.

Kedua Pak Menteri, kami meminta data. 256 ribu hektar ini, tanahnya siapa saja? Kenapa saya tanyakan ini? Aaya mewakili teman-teman ini, penting bahwa status hukum ini juga jelas. Jangan nanti ada permasalahan di kemudian hari. Saya paham di daerah itu. Hampir tidak ada permasalahan mengenai masalah ulayat, bukan tidak ada, bukan tidak ada, hampir tidak ada. Dan juga Pak Menteri situasi di Taman Hutan Raya di Bukit Soeharto dan lain-lain itu, tidak seperti yang digambarkan, nanti bisa dilihat, sudah banyak yang diokupasi, sudah banyak juga yang tambang, bahkan Taman Bukit Soeharto itu hanya dipinggirnya saja yang kelihatan bagus, kalau sudah ke dalam sudah tidak baik sebenarnya. Jadi mohon kami diberikan data 256 hektar itu dari mana saja? Apakah itu HTI, HGU segala macam IPK, pemanfaatan dan lain-lain.

Yang ketiga Pak Menteri. Saya sudah mendapatkan laporan, ada juga HGU yang tidak masuk di daerah Ibu Kota, tapi yang menjadi penunjang di daerah lain, termasuk di Pasir Penajam Utara dan Kutai, ada yang mau ditarik HGU nya. Nah ini penting soal jaminan investasi. HGU masih 20 tahun lagi, tapi sudah mau ditarik di sana karena masukan dari juga Bupati dan lain-lain, saya tidak tahu, saya mau menenggarai hal itu, tapi nanti kita bisa membahas ini lebih lanjut. Jangan sampai sebelum waktunya hal-hal seperti itu menjadi mengganggu untuk nanti Ibu Kota ini. Artinya, bahwa status hukum juga harus jelas. Ini sudah dirasakan Pak Sihar dan teman-teman yang lain juga. Kalau ini tidak terjamin, bagaimana mereka mau menginvestasikan Pak Menteri di Ibu

Kota ini, termasuk nanti yang dikatakan investor dari luar negeri, dari grup manapun itu, termasuk dari *softbank* dan lain-lain. Mereka akan melihat itu.

Nah sebelum saya terlupa, mohon waktu sedikit lagi, Pak, itu sudah ada juga jalur kereta yang direncanakan oleh Rusia, yang nanti akan mengambil dari arah pegunungan yang itu namanya tambang dan lain-lain, kemudian itu akan terintegrasi ke Kalimantan Tengah, apakah bisa juga ke Kalimantan Barat. Nah maksud saya, alur laut dipenuhi, begitu juga untuk kereta ini kemungkinan bisa jadi satu paket yang baik sekali. Sehingga tidak hanya tidak Ibu Kota ini saya yang kita dengar, tetapi juga mempengaruhi juga kepada provinsi yang ada di sekitarnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan juga di tempat Bapak nanti, di tempat Pak Elnino, Gorontalo dan lain-lain, ini bisa mempengaruhi, di Selat Makasar. Ini luar biasa. Sayang Pak Menteri, kalau kita hanya mensosialisasikan ini dan kami siap membantu Pak Menteri dan juga jajaran mensosialisasikan ini bukan sekedar sosialisasi Ibu Kota Negara, menurut saya jangan sekecil itu, sayang Pak, dengan anggaran yang demikian besar kalau hanya targetnya hanya membuat Ibu Kota Negara yang cantik, yang baik, yang kultural, tidak seperti itu. Tetapi betul-betul komprehensif meningkatkan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini, ini menjadi motor. Kenapa ini perlu? Karena kehidupan kita yang paling penting adalah harapan. Kalau ada harapan baik, ini membuat semua kita bersemangat, saya sepakat apapun persoalan yang ada di Cina, Corona atau apapun itu, jangan membuat kita kehilangan fokus. Karena kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam kita, apakah kita tergantung dengan dunia luar? Tidak juga. Bukan kita artinya menganggap ini menjadi rendah, menganggap sepele, tapi artinya kita mempunyai kekuatan sendiri yang luar biasa.

Saya rasa itu barangkali Pak Menteri. Kami siap bahwa sekarang legislator ini bukan hanya memberikan marah atau memberikan masukan, tapi kami siap juga ikut berperan serta dalam hal ini. Karena saya sudah lihat Pak Sihar dan Pak Misbakhun senyum-senyum Pak. Barangkali nanti bisa juga menanam modal di sana kenapa tidak, tapi tentu ada harus jaminan, jaminan yang jelas dari status hukum, kepastian hukum kita.

Saya rasa itu barangkali Pak Menteri dan jajaran, melalui meja pimpinan, saya tidak perlu dijawab, nanti Pak Menteri secara lisan, tertulis saja Pak Menteri dan jajaran, saya juga mohon pamit, karena kami.. kami sebenarnya hanya menunggu izin dari Pak Menteri dan juga rekan-rekan, Pimpinan dan Anggota kami nanti jam 14 harus menghadiri rapat DPP. Jadi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat Pak Menteri, kami mohon izin, mohon pamit untuk bisa menghadiri Rapat DPP dan doa kami Pak Menteri, Bappenas seluruh jajarannya tentu bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik mempunyai harapan yang lebih baik ke depan.

Sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Merdeka.

Terima kasih Pak Eriko.

Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi XI yang saya hormati.

Demikian kita dengarkan tadi pertanyaan, masukan dan pendalaman terkait dengan materi yang kita bicarakan pada hari ini dan selanjutnya tentu kita berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menjawab. Ada 21 anggota ditambah 2 pimpinan, tentu tidak mungkin dijawab satu persatu. Kami beri kesempatan untuk menjawab secara global saja. Mungkin selanjutnya bisa dijawab secara tertulis.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Baik terima kasih.

Kebetulan kami juga diundang Ratas jam 3 dan tempatnya di Bogor.

Baik, saya bisa mengklasifikasikan pertanyaan itu, terkait seperti yang saya duga pasti ramai soal pertumbuhan ekonomi, kemudian mengenai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang akan datang, kemudian IKN dan saya telah mendengar tadi ada pro dan kontranya. Ada beberapa hal yang sifatnya itu sektoral, *stunting*, perumahan, kemudian bagaimana dengan ASN, termasuk ASN yang pindah. Saya kira itu secara garis besar yang pertanyaan-pertanyaan itu.

Pertumbuhan ekonomi. Ini menarik pertumbuhan ekonomi. Saya akan memulai pertumbuhan ekonomi dengan satu, saya lupa apakah saya pernah sampaikan di ruangan ini, tetapi setidaknya-tidaknya dulu di kantor Bappenas itu, pernah ada seorang yang bekerja di sana dari MIT, namanya *Esther Duflo*, suaminya namanya *Benenergy* dan keduanya itu dari MIT, mereka kedua orang inilah yang memenangkan hadiah nobel ekonomi. Jadi kalau mau menang hadiah nobel ekonomi, tolong kerja di Bappenas, tetapi tidak boleh sakit perut, kalau sakit perut itu paling bisanya jadi manajer.

Jadi...(suara tidak jelas) itu tidak boleh begitu, gak boleh ya Pak Mis, gak boleh begitu.

Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan, kok dia bisa mendapatkan hadiah nobel itu. Menurut tulisan itu, menurut yang mempertimbangkan dan menurut dia sendiri, tidak biasa sebuah negara itu berubah secara struktur karena intervensi di bidang pendidikan, di sektor pendidikan. Dan Indonesia membuktikan yang *unusual policy* itu. *unusual policy* itu adalah apa yang dikenal dengan SD Inpres. Jadi SD Inpres itu mengubah struktur ekonomi Indonesia, paling tidak mempengaruhi profil dari tenaga kerja kita yang tadinya hanya rata-rata 2 tahun, 2-3 tahun di sekolah menjadi kemudian di atas 6 tahun, 7 tahun dan itu mengantarkan Indonesia melepaskan diri dari *low income countries state* menjadi *middle income*. Kita mendahului Cina dan kalau kita hitung berdasarkan triple p, *processing power parity* itu memang kejadiannya tahun 1990-an. Dan memang trajektorinya kita kemudian kalah dengan Cina, karena kita mengalami penurunan ketika tahun 1997 dan 1998, bahkan kita turun total GDP kita juga. Tetapi kita cepat kembali dan hari ini kira-kira kita sudah masuk di *middle income*. Jadi *middle income* kita itu terpotong.

Menurut teori, teori yang baik di ADB maupun Bank Dunia, saya sendiri pernah bertemu dengan orangnya, Saudara Felipe mengenai *middle income trap* ini. Kebetulan saya juga memberikan mata kuliah *middle income trap* di Guang Dong *Universitas Finance* dan di *Nottingham* soal ini. *Middle income trap* mengenai Indonesia kasus Indonesia.

Jadi *middle income trap* ini harusnya berdasarkan segala faktor yang mengintervensinya, itu maksimum jebakan ini 28 tahun. Bagaimana itu dia menyusunnya, ya memang berdasarkan penelitian dilakukan oleh kelompok ini. Sebenarnya mereka melakukan tahun 2012. Baru dikenal *middle income trap* ini. Dan semua negara memang tidak mudah untuk apa namanya *graduate* dari MIT, karena MIT susah masuknya sekolah, tapi kalau *graduate* MIT juga *middle income trap* itu juga tidak mudah. Karena itu kita berpikir dipimpin oleh Pak Bambang ini, mengenai mendiagnosa pertumbuhan intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah bentuk atau konfigurasi ekonomi kita ke depan. Ternyata memang pada beberapa tahun terakhir ini terjadi proses deindustrialisasi yang ditandai dengan kontribusi dari sektor industri manufaktur yang turun di bawah 20%. Seperti tadi saya sampaikan, kalau sumbangan dari industri manufaktur itu di atas 20% atau minimal di 20% kita sudah masuk di negara Industri. Dan ini mengakibatkan apakah itu salah satu faktornya? Jadi dilakukanlah *root* diagnostik sedemikian rupa, maka dapatlah dua enabler yang kuat di situ, yaitu pertama industri manufaktur dan yang kedua konstruksi.

Jadi bukan berarti kami meniadakan pertumbuhan dari sektor-sektor lainnya, sama sekali tidak. Jadi misalnya pertanian, tadi yang disampaikan oleh Pak Sarmuji dan banyak. Kami ada semua itu. Cuma yang paling *outstanding* yang kira-kira bisa punya pengaruh yang kuat itu adalah di industri manufaktur sumbangannya. Dan itu alasan kenapa dua yang kita coba dan paling tinggi adalah industri manufaktur dan kemudian konstruksi. Kita berharap industri manufaktur itu kembali kesumbangannya di atas 20% setidaknya tidaknya menembus di 21%. Nah untuk naik 21% itu diperlukan pertumbuhan dari industri manufaktur itu sekitar 7%. Nah kalau itu 7%, mudah-mudahan sumbangannya 21%. Nah ini akan mengubah sedikit konfigurasi kita dan akan *structure* dari ekonomi di Indonesia akan berubah. Apakah itu *broth spectrum* apakah itu khusus, itu kita belum lihat memang, karena sekarang banyak hal dulu kita bisa terjebak dengan pilihan-pilihan semacam itu, karena industri berkembang luar biasa. Bisnis model sudah berubah, Pak Sihar pasti tahu, bisnis model sudah berubah, sehingga *production system* juga sudah berubah. *Production system* sudah berubah, artinya kita perlu melakukan *upskilling*, *rescalling* terhadap kita punya *man power*. Jadi memang perubahan ini cepat secara *structure* dan bukan hanya Indonesia, setapi seluruh Indonesia.

Lalu memang keadaan ekonomi dunia yang sedang seperti ini dan kita bersyukur sebenarnya GDP kita itu lebih banyak bergantung kepada *consumption*. Cina sekarang itu berusaha untuk membalikan dari ketergantungannya yang tinggi terhadap ekspor itu ke konsumsi dalam negeri. Nah kita konsumsi dalam negeri kita sekarang sudah disekitar 55%. Jadi kita harapkan kalau pertumbuhannya saja 5%, dan itu *flat* memang, negara-negara seperti kita ini memang kontribusi dari *consumption* itu tinggi dan pertumbuhannya relatif itu 5%, kita sudah mendapatkan sumbangan 2,75%. Maka sekarang kita bisa lihat tambahan apa lagi dengan sedikit pengurangan plus-minus di mana saja kita juga bisa lihat fungsi dari APBN, karena APBN kita bisa keluarkan juga dari situ *government expenditure* masuk *consumption*

ada juga kita bisa ambil dari APBN itu masuk diinvestasi. Tetapi kira-kira hanya 7% dari GDP investasi dari pemerintah dalam bentuk belanja modal.

Nah yang kita perlukan berapa? Kita hitung kira-kira kita membutuhkan sekitar 3500 triliun untuk PMTB ya besarnya PMTB dan jangan kita membayangkan itu susah bagaimana, karena ini termasuk repetitif dari industri-industri yang dipimpin oleh Pak Sihar. Nah mereka melakukan belanja modal, belanja barang dan seterusnya, itu perhitungannya di sana, cuma pertambahan-pertambahan yang sensitif yang kita perlukan itu, tambahan delta itu, kira-kira sekitar 700-800 triliun. Jadi kalau kita ini cermat di sini, menurut saya Ibu Kota Negara ini kalau dengan 466 triliun, sebenarnya menolong, dari APBN sekitar 89,9 triliun kira-kira hampir 90 triliun, sisanya adalah bisa *direct investment*, bisa KPBU kita masih terbuka. Bahkan ada yang menawarkan dengan cara bisnis model yang baru yaitu *subscriber*, pelanggan dan kalau *subscriber* pelanggan itu artinya penduduk itu menjadi pelanggan selama-selamanya selama dia tinggal di situ, kan itu apakah menarik atau tidak, kita lihat saja berapa uang yang harus dia keluarkan *spending* perorang sekitar 85 dolar misalnya atau 65 dolar misalnya. Itu satu orang atau satu rumah itu 4 orang, 340 an, 340 dolar berarti dia harus keluarkan. Nah hitungan-hitungan secara detail *technical* seperti ini teknokratis, kami lakukan. Jadi bukan tidak kami lakukan pertumbuhan ekonomi.

Kami sebenarnya memberikan 3 angka pertumbuhan ekonomi pada Presiden yang di bawah, di tengah dan di atas, tapi Presiden memilih yang di tengah dan yang di atas. Saya kira itu adalah bagian dari sikap beliau yang optimis dan mesti kita dukung dan saya kira kerja kami adalah kerja teknokratik. Kalau kami mengambil yang di bawah, namanya kami bukan pembantu Presiden. Justru kami harus dukung Presiden dengan yang optimistik itu dan kita akan mengajak kita semua optimis. Bahwa nanti dalam perjalanannya akan ada koreksi, ya ini sektor yang bukan *fix* begitu, tetapi kan perkembangannya dipengaruhi oleh segala sesuatu di luar kehendaknya sendiri, kehendak dari faktor ekonomi itu sendiri. Itu soal pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bisa diskusi panjang soal ini, saya juga sudah debat dengan teman-teman yang lain. Tetapi saya percaya kalau negara seperti Indonesia, itu potensi untuk tumbuh masih lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, dia sudah mendekati angka asimtotnya. Jadi kalau sudah masuk di angka asimtotnya, paling berapa dia, 2%, 3% itu sudah bagus itu. Jadi jangan berpikir juga Cina kemudian kemarin bisa *double digit*, itu memang situasi dunia memerlukan barang-barang dia yang murah, waktu itu di Cina masih murah, tapi sekarang Cina juga tidak murah begitu.

Nah yang kedua adalah soal, saya setuju mengenai *rule of time seventy two*. Memang kalau kita hitung 3% atau 4% dari *rate of return* itu, ya mungkin sekitar 72 dibagi 3 ya, berapa? 24. Nah 24 tahun. Memang 24 tahun larinya bisa tahun 2049, tapi kalau kita bisa membuat itu lebih bagus, di 4% misalnya, akan beda *rate of return* untuk itu. Jadi kalau 4% berarti 18 tahun. Kalau 18 tahun berarti 2043 sudah bisa, 25 ditambah 18 tahun saya kira. Jadi.. dan itu *rule of time seventy two* di tempatnya para pengusaha, interpreneur dan investasi dan itu dalam bentuk saya kira investasi apa saja.

Nah catatan saya juga atasan kami di sini mengenai *monetary*. *Monetary* tadi yang disampaikan, bukan kami tidak mempertimbangkan, tapi mempertimbangkan kok. Sekarang dana pihak ketiga, dana pihak ketiga yang tersedia itu kira-kira sekitar 5.800an triliun dan dengan LDR sekitar kira-kira

95%, bahkan sudah mentok, maka katakan tinggal 4% atau 5%, maka uang yang tersedia di bank itu tinggal 290an triliun, 280an triliun, sementara kebutuhan kita begitu besar. Jadi tidak mungkin kalau tidak kita harapkan adalah *foreign direct investment*. Tidak bisa kita. Apa boleh buat, karena di kita mau cetak uang atau mau membuat perputaran yang jauh lebih kencang, *velocity of money* lebih tinggi, tapi apa gitu? Nah ini saya kira sama-sama kita pikirkan. Jadi saya senang mendapatkan masukan-masukan seperti tadi.

Kemudian proses Musrenbang dan nanti kemudian RKP. Saya ingin menceritakan, bahwa ke depan memang kita akan mengubah. Jadi seperti permintaan Presiden kepada kami bahwa seperti ketika Beliau memimpin di Walikota Solo, itu ada Kepala Dinas yang nol, ada Kepala Dinas yang gemuk, tapi tahun itu, tahun berikutnya berubah. Sekarang ini kita banyak Dirjen dan satu Dirjen satu program, kita ada dua ratusan lebih Dirjen, satu Dirjen satu program minimal. Kadang-kadang satu Dirjen itu bawa 3, 4 program karena Direkturnya di bawah. Jadi kalau kita *structure* dari Kementerian itu luar biasa, jadi uang tidak ada artinya kalau begitu. Nah sekarang saya mau mengubah, saya bilang kepada Menteri Keuangan, kita mesti ubah ini. Jadi kita lihat tusi dari Kementerian itu, tidak dari tusi dari Direktorat Jenderal itu, bukan visi-misi Menteri, itu yang dimaksud Kementerian, itu dimaksud oleh Presiden bahwa yang ada visi-misi Presiden. Kami menafsirkan, menterjemahkan seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang turun, ada yang menjerit, ada yang sakit perut, itu artinya ya kita sesuaikan gitu ya. Jadi seperti misalnya kemarin Kamis udah melakukan bilateral dengan Kementerian Keuangan, sudah menyanding Krisna dan Sakti. Jadi ke depan mudah-mudahan itu jauh lebih baik lagi.

Jadi pertama pada penyusunan Musrenbang itu dalam penyusunan RKP yang ke depan ini, kita tentu akan melihat di agenda pembangunan itu, 7 agenda pembangunan itu seperti apa. Jatuhnya semua program itu adalah dispasial, di mana dia? Tempatnya di mana? ya kan, kecuali kalau sifatnya itu kebijakan umum, tetapi kan dia memerlukan letaknya, mau dilektakan di mana dia. Nah cara meletakkan itu tergantung *stressing* RKP, yaitu tema-teman RKP itu. Kita menggunakan tema RKP dengan merujuk kepada RPJMN ...(**rekaman terputus**)... itu menggunakan 7 agenda pembangunan itu. Nah setelah itu kita ambil tema-tema, tematiknya, tekanan-tekanannya pada tahun pertama, misalnya kita akan mendorong pariwisata dan industri, gitu maka itu *layer* kedua. Nanti *layer* ketiga itu aspirasi. *Layer* keempat kita baru dapat konfigurasi seperti apa dan seterusnya. Saya secara teknis saya bisa sampaikan pada saatnya nanti.

Jadi bisa dipertanggung jawabkan secara politik dan legal, itu yang penting dan menyertakan apa yang disebutkan dengan partisipasi, bahwa pembangunan itu perencanaan pembangunan itu adalah partisipasi.

Yang ketiga yang ingin saya jawab pada soal Ibu Kota Negara, soal pro dan kontra. Iya tadi sudah disampaikan sentantiasa ada yang pro dan kontra. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa IKN itu juga bisa menjadi *enabler* untuk sebagai tempat yang atraktif untuk menarik investasi ke Indonesia. Ya tentu saja kita tidak akan membangun dengan dana dari APBN yang begitu terbatas. Kalau 89 triliun atau 90 triliun dibagi 4, itu hanya 22,5 triliun/tahun, kecil sekali dibandingkan kita punya APBN yang 2.400 triliun, itu tidak sampai 1%. Jadi itu kecil sekali. Jadi bertahap kita gunakan. Dan cara-caranya beragam dan kami sudah buka ke dunia internasional peluang-peluang itu,

termasuk apakah kita akan menggunakan energi baru terbarukan, apakah dalam bentuk *lithium battery*, apakah dalam bentuk hidrogen dan seterusnya.

Stunting. *Stunting* itu tadinya kami hanya mau menurunkan sampai di angka 19%, tetapi Bapak Presiden meminta tahun 2024 turun ke 14% dan tentu cakupannya kalau tadi jumlahnya semakin besar, artinya dana yang tersedia memang diperluas lebih konvergen, lebih terbuka, lebih lebar ke semua kabupaten/kota. Jangan sangka di Jakarta pun ada *stunting*. Jadi bukan berarti kalau di sini, bahkan banyak orang yang tidak paham apa sebenarnya *stunting*, mereka anggap katanya kekerdilan. Kalau kekerdilan nanti dipikir saya juga hasil *stunting*.

Itu kan senang sekali dia mendapatkan kesempatan untuk tertawa, maksudnya dia dari tadi bertahan untuk mentertawakan saya.

Kemudian soal Perumahan. Saya kira nanti saya jawab secara detail, karena orangnya juga sudah tidak ada. ASN yang pindah, itu tentu tidak dengan serta-merta tidak kita perhatikan kira-kira *benefit* yang bisa dia dapat di sana. Kita mempertimbangkan misalnya dia selama ini punya rumah di sini atau kontrak atau dia sedang mencicil dan cicilannya belum selesai, itu kita pikirkan. Jadi bukan berarti beban itu semua diberikan kepada dia, karena ini keputusan negara, keputusan kita semua, jadi merekapun harus kita pertimbangkan.

Saya kira itu jawaban dari saya. Selebihnya nanti dijawab secara tertulis.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Izin Pimpinan, sedikit Pimpinan.

Tentang warga atau manusia ya Pak ya, kalau misalnya tadi ASN akan memenuhi Kaltim, *Insyallah* kalau pindah tahun 2023. Tentu juga harus dipikirkan juga masyarakat yang ada di sana, karena bagaimanapun juga mereka mungkin stratanya atau sumber daya manusianya kan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan untuk Ibu Kota, saya pikir mereka juga harus dilibatkan agar mereka tidak merasa terpinggirkan.

Terima kasih.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Baik, itu sudah melakukan Pak Ketua, melalui Pimpinan, kami sudah pendekatan, kami sudah mengajak dan tentu banyak juga lapangan pekerjaan yang bisa diberikan kepada mereka. Intinya mereka tidak menjadi merasa asing di tempatnya mereka sendiri.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Ibu Indah.

Pak Menteri yang saya hormati, teman-teman.

Saya kira demikian apa yang sudah diberikan tanggapan dan jawaban dari Pak Menteri untuk kita semua di Komisi XI ini. Saya kira untuk jawaban lengkapnya kita berikan kesempatan Pak Menteri untuk menjawab secara

tertulis dan detail. Dan sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, saya akan membacakan atau menampilkan tayangan terkait dengan rancangan kesimpulan dari hasil pertemuan kita hari ini.

Silakan dibaca kesimpulan teman-teman, apa perlu saya bacakan juga? Saya baca, karena ini permintaan Pak Hatari, harus kita ikuti ini.

***Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020
Selasa, 4 April 2020.***

Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyepakati:

- 1. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, sehingga dapat merealisasikan sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, termasuk dalam proses persiapan dan membangun Ibu Kota Negara dengan tetap menjaga target pembangunan yang telah ditetapkan.*

Ada yang dikoreksi?

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN, ST.,M. Si.):

Pimpinan, pimpinan.

Ini redaksional saja, tidak harus ada kata dalam di situ.

F-PKS (H.ECKY AWAL MUCHARAM):

Pimpinan sebelah kiri, boleh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ecky baru datang, silakan.

F-PKS (H.ECKY AWAL MUCHARAM):

Terima kasih.

RPJMN itu kan Pak Menteri... Ecky Mucharam Pak Menteri.

RPJMN ini cakupannya lebih luas ya. Jadi saya rasa lebih bagus memang dipisah saja nomor tersendiri. RPJMN sendiri, kalau memang nanti Ibu Kota mau dimasuk juga nomor sendiri. Kenapa? Karena RPJMN ini sangat luas, sehingga tidak ter.. bukan tersempitkan ya apa namanya termiopisasi apa namanya dengan satu aspek saja.

Demikian Pimpinan, karena ini komitmen bersama dan bentuknya juga dalam Undang-Undang tersendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan ada saran dari Pak Ecky, kita pisah antara RPJMN dengan Ibu Kota Negara. Tidak apa-apa Pak Menteri ya?

Silakan, silakan coba di... udah ya?

F-PKS (H.ECKY AWAL MUCHARAM):

Jadi yang jelas kan sama-sama berkomitmen membuat perencanaan yang bagus kan intinya kan?

KETUA RAPAT:

Ya, jadi saya ulang.

1. *Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, sehingga dapat merealisasikan sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.*

Sepakat? Sepakat ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. *Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara dengan menjaga target pembangunan yang telah ditetapkan.*

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Kalau target pembangunan sebetulnya kaitannya dengan RPJMN. Betul gak? Beliau kan senior saya ini. Iya itu nanti proses perencanaan, karena proses perencanaan Ibu Kota itu lebih sifatnya teknis. Kalau yang RPJMN lebih global, makro dan struktural.

KETUA RAPAT:

Iya target pembangunan sudah terakomodir di...

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Ya di tarik ke.. yang target pembangunan pindah ke RPJMN yang untuk Ibu Kota silakan mau kalimatnya apa, tadi betul idenya Pak Misbakhun, mungkin Pak Menteri punya. Artinya memang betul-betul bukan soal masalah Undang-Undangnya saja, karena publik harus tahu terkait perencanaan yang memang perlu bisa diterima oleh publik dan implikasi.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi..

2. *Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara.*

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Maksudnya mungkin tadi itu kalimatnya adalah perencanaan atau persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini tidak mengganggu, tidak mengganggu target pembangunan.

KETUA RAPAT:

Jadi,

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara tanpa mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan.

Iya Pak Ecky sudah?

F-PKS (H.ECKY AWAL MUCHARAM):

Termasuk proses perencanaannya itu sebetulnya, poinnya kan namanya Bappenas perencanaan, proses perencanaan, karena publik harus tahu, oh ya *firm* ini proses perencanaan dalam pembangunan Ibu Kota ini oke begitu. Bahwa *impactnya* dari sebuah proses perencanaan itu adalah kalau betul diproses secara profesional, secara bertanggung jawab, tidak karena serta merta saja, tentunya adalah tidak akan mengganggu target pembangunan.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi saya ulang konsepnya,

2. *Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk mempersiapkan proses perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara tanpa mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan.*

Bagaimana Pak Menteri setuju?
Sudah bagus Pak Hatari ya?

(RAPAT : SETUJU)

3. *Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan 7 agenda pembangunan prioritas nasional, termasuk yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kualitas sumber daya manusia untuk periode 2020-2024.*

Silakan Pak Dolfie tadi.

F-PDIP (DOLFIE, O.F.P.):

Interupsi Pimpinan.

Ini karena di situ ada per *issue*, ketahanan pangan, energi dan kualitas sumber daya manusia disebut. Tadi saya sempat memberikan atensi Pak Menteri, terkait yang disampaikan visi-misi Pak Jokowi di KPU, yang belum diberi atensi menurut saya pada 7 agenda tersebut. Yang pertama reformasi pendidikan untuk membangun insan karakter Pancasila itu. Yang kedua, reformasi kesehatan. Yang ketiga penguatan ekonomi kerakyatan. Keempat terakhir reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Jadi kalau kita mau sebut per *issue*, yang saya beri atensi, mohon dicantumkan juga Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Coba kalimatnya yang lebih singkat yang bisa mengakomodir semua ini apa ini? Terlalu panjang ini.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan 7 agenda pembangunan prioritas nasional, termasuk yang terkait dengan reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi sistem perencanaan anggaran, ketahanan pangan, ketahanan energi dan kualitas sumber daya manusia untuk periode 2020-2024.

Dari Pak Menteri ada koreksi?
Teman-teman tidak masalah ya?

F-PD (Hj. VERA BEBYANTHY, M. Si.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Ini kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dolfie, berkaitan dengan visi-misi Presiden. Ini juga saya ingin menanyakan mengenai revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, apakah itu bisa dimasukkan, karena ini janji.

KETUA RAPAT:

Kualitas sumber daya manusia.

F-PD (Hj. VERA BEBYANTHY, M. Si.):

Tapi perlu disampaikan.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih Ibu Vera.
Kemudian,

4. *Kementerian PPN/Bappenas memberikan jawaban tertulis maksimal 7 hari kerja atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR pada Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN tanggal 4 Februari 2020.*

Masih ada? Sudah? Standar ya. Oke Pak Har.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, saya kira kesimpulan rapat kerja siang hari ini, kepada Pak Menteri dan kita semua sudah sepakat, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan *closing statement* sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (SUHARSO MONOARFA):

Terima kasih.

Jadi kita telah mengawali satu pembahasan mengenai RPJMN dan di ujungnya adalah persiapan dalam rangka RKP. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan yang telah disampaikan kepada kami dan tentu akan kami akomodasi dalam perubahan-perubahan demi perbaikan, termasuk hal yang terkait dengan Ibu Kota Negara.

Terhadap Ibu Kota Negara, mungkin setelah nanti terbentuknya Badan Otorita persiapan pemindahan Ibu Kota Negara, itu Bappenas hanya menjadi penasehat untuk menasehati. Jadi tidak masuk lagi di dalam pekerjaan yang sifatnya teknis di lapangan. Saya sampaikan ini, karena itu kami mengantarkan sampai nanti terbitnya *masterplan* dan selesainya Undang-Undang. Jadi selesainya Undang-Undang, *masterplan* dan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Sekali lagi atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf, apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, Rapat Kerja hari ini saya tutup dengan resmi.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.23 WIB)

Sekian.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Februari 2020

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001